

**ANALISIS DAYA SAING USAHATANI
JAGUNG DAN KEDELAI DI SULAWESI SELATAN**

**HARDIANTI SYAM
105960191815**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**ANALISIS DAYA SAING USAHATANI
JAGUNG DAN KEDELAI DI SULAWESI SELATAN**

**HARDIANTI SYAM
105960191815**



SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian
Strata Satu (S-1)

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Daya Saing Usahatani Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan
Nama : Hardianti Syam
Nim : 105960191815
Program Studi : Agribisnis

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P
NIDN.0921037003

Sitti Arwati, S.P., M.Si
NIDN.0901057903

Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Prodi Agribisnis

H. Burhanuddin, S.Pi., M.P
NIDN.0912066901

Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P
NIDN. 0921037003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisis Daya Saing Usahatani Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan

Nama : Hardianti Syam

Nim : 105960191815

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

KOMISI PENGUJI

Nama Tanda Tangan

1. Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P
Ketua Sidang

2. Sitti Arwati, S.P., M.Si
Sekertaris

3. Dr. Ir. Muh. Arifin Fattah, M.Si
Anggota

4. Firmansyah. S.P., M.Si
Anggota

Tanggal Lulus :

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Daya Saing Usahatani Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan** adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.



Makassar, Juni 2019

Hardianti Syam

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta inayah-Nya, yang karena-Nya penulis diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Daya Saing Usahatani Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi penulis senantiasa diberikan arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan cepat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasi kepada yang terhormat :

1. Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P selaku pembimbing I dan Sitti Arwati, S.P., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. H. Burhanuddin, S.Pi., M.P selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kedua orangtua ayahanda Saming dan Ibunda Nurmi, adikku tercinta Muh Ihsan Nur, dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Agribisnis yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Sahabat-sahabat tercinta “RJR” Fitri Pratiwi, Isnawati, Putri Wulandai Juir, Tria Namirah Arhan, Anisa dan Nilasari terima kasih atas sekian lama persahabatan kita.
6. Teman-Teman “METAMORFOSIS 015” yang telah berjuang bersama.
7. Teman-Teman “ANABOLISME B” yang mengajarkan arti persaudaraan dan kekompakan.
8. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Agribisnis yang telah memberikan pengalaman dan semangat.
9. Wahyudi Rahmat, Sulaeman, Windis Januari Ramadhan dan teman-teman yang tidak dapat saya sebut namanya satu per satu, terima kasih atas kegaduhan yang begitu menyenangkan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Makassar, Juni 2019

Hardianti Syam

ABSTRAK

HARDIANTI SYAM.105960191815. Analisis Daya Saing Usahatani Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan. Dibimbing Oleh SRI MARDIYATI dan SITTI ARWATI.

Penelitian ini mengkaji daya saing dan keunggulan kompetitif serta keunggulan komparatif terhadap usahatani jagung dan kedelai di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis daya saing dan keunggulan kompetitif serta keunggulan komparatif terhadap usahatani. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui data analisis ekonomi serta harga dunia jagung dan kedelai dari instansi terkait dan publikasi ilmiah mengenai pertanian. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM).

Hasil analisis PAM dalam penelitian ini menunjukkan usahatani jagung dan kedelai Sulawesi Selatan memiliki daya saing keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Tetapi kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara keseluruhan belum efektif memproteksi usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Palawija.....	9
2.1.1 Jagung.....	9
2.1.2 Kedelai.....	10
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Analisis Daya Saing.....	12
2.2.2 Keunggulan Komparatif.....	14
2.2.3 keunggulan kompetitif	16
2.2.4 Kebijakan Pemerintah.....	18
2.2.5 Input dan Output Pertanian.....	25
	viii

2.3 <i>Policy Analysis Matrix</i> (PAM)	28
2.4 Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2 Teknik Penentuan Sampel.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
3.6 Definisi Operasional	40
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
4.1 Letak Geografis.....	43
4.2 Kondisi Demografis	46
4.3 Kondisi Pertanian.....	55
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
5.1 Analisis Daya Saing	57
5.1.1 Analisis Daya Saing Usahatani Jagung	57
5.1.2 Analisis Daya Saing usahatani Kedelai	61
5.2 Dampak Kebijakan.....	64
5.2.1 Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Usatani Jagung	65
5.2.2 Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Usatani Kedelai	70
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81
RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1	Luas Panen dan Produksi Tanaman Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017	4
2	Luas Panen dan Produksi di Daerah Sentra Jagung Sulawesi Selatan Tahun 2013-2015	5
3	Luas Panen dan Produksi di Daerah Sentra Kedelai Sulawesi Selatan Tahun 2013-2015	6
4	<i>Policy Analysis Matrix</i> (PAM).....	34
5	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2017	54
6	Keuntungan Privat dan Sosial Usahatani Jagung di Sulawesi Selatan Per Musim Per ha (Rp.000), 2017	57
7	Keuntungan Privat dan Sosial Usahatani Kedelai di Sulawesi Selatan Per Musim Per ha (Rp.000), 2017	61
8	Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Jagung dan Kedelai Provinsi Sulawesi Selatan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1	Kurva Dampak Pajak dan Subsidi pada Input <i>Tradeable</i>	18
2	Kurva Dampak Pajak dan Subsidi pada Input <i>Non Tradeable</i> .	19
3	Kurva Dampak Tarif Impor.....	21
4	Skema Kerangka Pikir Analisis Daya Saing Usahatani Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1	Tabel Indikator Penelitian	81
2	Peta Lokasi Penelitian	82
3	Data Harga komoditas Bank Dunia	83
4	Tabel Alokasi Biaya Input Domestik dan Asing Usahatani Jagung dan Kedelai	85
5	Tabel Perhitungan <i>Standar Conversion Factor</i> dan <i>Shadow Price Exchange Rate 2017</i>	86
6	Tabel Perhitungan Harga Bayangan Benih Jagung dan Kedelai Sulawesi Selatan.....	87
7	Tabel Perhitungan Harga Bayangan Output Jagung dan Kedelai.....	87
8	Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk Urea	88
9	Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk SP36	89
10	Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk KCL.....	89
11	Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk ZA	90
12	Tabel Perhitungan Harga Pupuk NPK.....	90
13	Tabel Analisis Budget Privat dan Sosial Usahatani Jagung	91
14	Tabel Analisis Budget Privat dan Sosial Usahatani Kedelai	92
15	Surat Izin Penelitian.....	93
16	Dokumentasi Penelitian.....	94

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Indonesia berjalan beriringan dengan meningkatnya pula permintaan akan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang telah diakui secara internasional berdasarkan *Generak Comment* dari *The Committee on Economic, Social, and Cultural Right* (CESCR) hak atas pangan (*the right to food*) (Dewan Ketahanan Pangan, 2015).

Indonesia merupakan negara berpenduduk besar nomor 5 (lima) di dunia yang berhubungan dengan kebutuhan pangan yang tentu saja sangat besar. Jumlah produksi bahan pangan, terutama beras/gabah, jagung, dan kedelai serta ubikayu dan umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya (Hutabarat *et al*, 2014). Tanaman pangan sebagai komoditas pertanian merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar yang dianggap strategis dan sering mencakup hal-hal yang bersifat emosional dan bahkan politis. Terpenuhinya pangan secara kuantitas dan kualitas adalah hal yang sangat penting sebagai landasan bagi pembangunan manusia seutuhnya dalam jangka panjang (Hanafie, 2010).

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang memberi manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi menjelaskan

bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Unsur lingkungan strategis dalam pengembangan suatu komoditas pertanian yang perlu diperhatikan adalah liberalisasi perdagangan yang memberikan peluang dan tantangan baru. Liberalisasi perdagangan memberikan peluang baru karena pasar semakin luas sejalan dengan penghapusan berbagai hambatan perdagangan antar negara. Tetapi liberalisasi perdagangan juga akan menimbulkan masalah baru kalau komoditas yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar dunia. Secara teoritis, keunggulan kompetitif suatu komoditas merupakan *resultante* dari faktor-faktor yang menentukan keunggulan komparatif dengan faktor-faktor kunci berupa dimensi struktur (*structure*), perilaku (*conduct*) dan keragaan (*performance*) pasar. Disamping itu intervensi pemerintah (kebijakan pemerintah) akan turut mempengaruhi keunggulan kompetitif dan komparatif suatu sistem komoditas. Sebaliknya, data dan informasi tentang keunggulan kompetitif dan komparatif juga seyogianya merupakan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya (Siregar *et al.*, 2003).

Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 mengedepankan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas nasional yang merupakan amanat TRISAKTI dan NAWACITA pada agenda

prioritas ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk memperkuat dan meningkatkan ketahanan pangan, sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan periode 2015-2019, disebutkan bahwa: 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; 2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas panganyang didukung dengan pengawasan distribusi pangan, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga; 3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; 4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan; dan 6) Tersedianya sarana dan Prasarana irigasi (ketahanan air).

Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Jagung juga merupakan komoditas yang diminta di pasar dunia (Aldillah, 2017). Kedelai sebagai penghasil protein nabati yang sangat populer di Indonesia. Hampir seluruh kedelai di Indonesia dikonsumsi dalam bentuk pangan olahan seperti: tahu, tempe, kecap, tauco, dan berbagai bentuk makanan ringan (*snack*) (Suhartini,2018).

Indonesia memiliki beberapa wilayah yang menjadi sentra produksi jagung yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada beberapa daerah yang cukup menjanjikan atau berpotensi untuk menopang kebutuhan jagung dalam negeri maupun luar negeri seperti Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat. Keempat

wilayah tersebut terus dioptimalkan dalam budidaya tanaman jagung, yang tentunya untuk menambah pasokan kebutuhan jagung yang dibutuhkan (P, 2017). Provinsi sentra produksi kedelai di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan DI. Yogyakarta (Kementerian Pertanian, 2016).

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Tanaman Jagung dan Kedelai Di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Tahun	Luas Panen (ha)		Produksi (ton)	
	Jagung	Kedelai	Jagung	Kedelai
2017*	137,249	2,698	2.247,069	14,996
2016	185,332	5,486	2.065,125	62,054
2015	295,115	11,145	1.528,414	67,192
2014	289,736	7,237	1.490,991	54,723
2013	274,046	3,564	1.250,202	45,693

Sumber : Laporan Kementerian Pertanian Tahun 2017

2017* : Angka ramalan II/2017

Berdasarkan tabel 1 selama periode 2013-2017, luas panen jagung mengalami peningkatan dari tahun 2013-2014 dari 274,048 ha menjadi 295,115 sebesar 21,105 ha. Pada tahun 2016 mengalami penurunan yang drastis menjadi 185,332 ha, angka ramalan tahun 2017 luas panen jagung hanya 137,249 ha. Sementara luas panen kedelai pada periode 2013-2015 mengalami peningkatan dari 3,564 ha menjadi 11,145 sebesar 7,581 ha. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan drastis menjadi 5,486 dan angka ramalan sementara tahun 2017 sebesar 2,698 ha. Produksi jagung tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 produksi jagung mencapai 1.250,202 ton dan angka ramalan sementara 2017 mencapai 2.247,069 ton. Produksi kedelai pada periode 2013-

2015 mengalami peningkatan sebesar 21,449 ton dari 45,693 ton menjadi 67,192 ton. Tahun 2015-2016 produksi kedelai menurun sebesar 5,138 ton sehingga total produksi tahun 2016 yaitu 62,054 ton, sementara angka ramalan tahun 2017 hanya 14,996 ton.

Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa daerah yang memiliki produksi jagung terbanyak diantaranya adalah Kabupaten Jeneponto, Bone, Gowa, Bulukumba dan Bantaeng.

Tabel 2. Luas Panen dan Produksi di Daerah Sentra Jagung Sulawesi Selatan Tahun 2013-2015

Kabupaten	Komoditas Jagung	2015	2014	2013
Jeneponto	Luas Panen (ha)	47,955	49,627	53,287
	Produksi (ton)	271,074	264,529	226,060
Gowa	Luas Panen (ha)	41,445	42,599	39,997
	Produksi (ton)	224,079	221,932	213,443
Bulukumba	Luas Panen (ha)	26,642	29,047	31,295
	Produksi (ton)	102,824	126,137	117,355
Bone	Luas Panen (ha)	51,657	44,138	25,030
	Produksi (ton)	290,960	208,911	99,766
Bantaeng	Luas Panen (ha)	23,988	28,983	29,324
	Produksi (ton)	138,915	169,918	154,574

Sumber : Badan Pusat Statistik 2014, 2015 dan 2016

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari lima kabupaten dalam periode 2013-2015, Kabupaten Gowa memiliki luas panen jagung yang berfluktuatif. Kabupaten Bone menunjukkan luas panen yang meningkat setiap tahunnya. Tiga kabupaten lainnya yakni Bantaeng, Bulukumba dan Jeneponto terus menurun setiap tahunnya.

Luas panen Kabupaten Bantaeng menunjukkan penurunan setiap tahunnya sementara produksi terlihat berfluktuasi. Luas panen Kabupaten Bone menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut berbanding lurus dengan produksi yang terus meningkat. Luas panen Kabupaten Bulukumba menunjukkan penurunan setiap tahunnya dan berbanding lurus dengan produksi yang ikut menurun. Luas panen Kabupaten Gowa berfluktuasi sementara produksi terlihat meningkat. Luas panen Kabupaten Jeneponto menunjukkan penurunan setiap tahunnya sementara produksi terlihat terus meningkat.

Tabel 3. Luas Panen dan Produksi di Daerah Sentra Kedelai Sulawesi Selatan Tahun 2013-2015

Kabupaten	Komoditas Kedelai	2015	2014	2013
Bone	Luas Panen (ha)	15,896	19,442	9,393
	Produksi (ton)	29,398	29,210	14,696
Wajo	Luas Panen (ha)	5,608	4,556	5,554
	Produksi (ton)	11,517	6,847	7,869
Gowa	Luas Panen (ha)	5,303	860	1,705
	Produksi (ton)	7,310	1,350	2,573
Soppeng	Luas Panen (ha)	2,430	2,397	4,694
	Produksi (ton)	4,957	4,229	7,858
Maros	Luas Panen (ha)	2,913	4,850	4,385
	Produksi (ton)	4,298	7,156	6,107

Sumber : Badan Pusat Statistik 2014, 2015 dan 2016

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dari lima kabupaten dalam periode 2013-2015 memiliki luas panen yang berfluktuasi setiap tahunnya. Luas panen pada empat kabupaten yakni Maros, Soppeng, Gowa dan Wajo terlihat berfluktuasi dan berbanding lurus dengan produksi yang juga ikut berfluktuasi.

Luas Panen pada Kabupaten Bone terlihat berfluktuasi sementara produksi terus meningkat.

Untuk memahami kondisi daya saing, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif usahatani jagung dan kedelai saat ini dilakukan penelitian tentang daya saing usahatani jagung dan kedelai di provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, proposal ini bertujuan untuk menganalisis daya saing usahatani jagung dan kedelai dan menganalisis keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif di Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan usahatani jagung dan kedelai yang efisien akan mampu meningkatkan daya saing di pasar dunia. Dalam rangka melindungi petani dalam negeri pemerintah melaksanakan kebijakan tarif impor, pajak dan subsidi. Kebijakan ini akan mempengaruhi nilai jual komoditas jagung dan kedelai dalam negeri. Selain itu harga komoditas dalam negeri dan keuntungan usahatani sensitif terhadap perubahan harga internasional dan perubahan harga input produksi. Berdasarkan kondisi tersebut usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan harus memiliki daya saing dengan produk internasional untuk komoditas serupa dipasar dalam negeri menggunakan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM). Sehingga rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana daya saing usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menganalisis keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dan daya saing usahatani jagung dan kedelai Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui daya saing usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca sebagai sumber informasi terkait daya saing, kebijakan pemerintah terhadap usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan.
2. Bagi mahasiswa sebagai bahan referensi empiris bagi penelitian selanjutnya terutama dalam bidang ekonomi pertanian, dan agribisnis untuk lebih dikembangkan dalam rangka memperkaya kajian ilmiah ilmu ekonomi.
3. Bagi petani sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan usahatani.
4. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan pertanian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Palawija

2.1.1 Jagung

Jagung *Zea mays* merupakan tanaman serelia yang termasuk bahan pangan penting karena merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Sebagai salah satu sumber bahan pangan, jagung telah menjadi komoditas utama setelah beras (Purwono *et al.* (2011) dalam Arma *et al.*, 2013). Jagung mempunyai arti penting dalam pengembangan industri di Indonesia karena merupakan bahan baku untuk pakan ternak khususnya pakan ayam. Industri yang membutuhkan jagung sebagai bahan baku tidak hanya terbatas pada industri unggas dan produksi ternak seperti sapi, juga akan semakin berkembang ke industri-industri lainnya. Jika upaya peningkatan produksi jagung dalam negeri berhasil, maka impor jagung yang sekarang besar dapat dikurangi atau ditiadakan (Purwandari *et al.*, 2014). Jagung termasuk tanaman yang mampu beradaptasi baik dengan lingkungan dan termasuk tanaman C4 yang sangat efisien.

Menurut Riwandi *et al.* (2014) dalam Irana (2018), ketinggian tempat yang optimum untuk tanaman jagung yakni dari 0-1.300 mdpl. Tanaman jagung mempunyai daya adaptasi yang luas dan relatif mudah dibudidayakan, sehingga komoditas ini ditanam oleh petani di Indonesia pada lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang sangat beragam. Jagung dapat ditanam pada lahan kering, lahan sawah, lebak, dan pasang-surut, dengan berbagai jenis tanah, pada berbagai tipe iklim, dan pada ketinggian tempat 0-2.000 mdpl. Tipe iklim yang sesuai untuk

pertumbuhan tanaman jagung yaitu tipe iklim sedang, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Sesuai menurut wirosoedarmo *et al.* (2011), yang mengatakan bahwa tanaman jagung tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus, hampir berbagai macam tanah dapat diusahakan untuk pertanaman jagung. Di samping itu drainase dan aerasi yang baik serta pengelolaan yang bagus akan membantu keberhasilan usaha pertanaman jagung.

Pati jagung merupakan bahan baku utama dalam beberapa industri makanan. Dalam industri pangan, jagung digunakan sebagai bahan baku untuk industri pati jagung, industri tepung jagung, industri minyak, industri fermentasi, industri *polimeracy*, industri pati terkomodifikasi dan industri pemanis/ *sweetener*. Diperkirakan, dimasa mendatang permintaan produk-produk pangan olahan jagung akan terus meningkat seiring dengan perbaikan gaya hidup. Sebagai bahan pangan, jagung merupakan bahan baku utama dengan porsi mencapai 51%. Pertumbuhan industri pabrik pakan terus tumbuh dengan pesat dengan rata-rata pertumbuhan 10% pertahun dan akan terus bertambah karena semua populasi ternak akan terus bertumbuh dan ragamnya juga bertambah (Aswinda, 2017).

2.1.2 Kedelai

Kedelai *Glycine max* merupakan tanaman biji-bijian yang banyak dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Kedelai merupakan salah satu jenis kacang tanah sebagai salah satu sumber minyak dan protein utama dunia. Kedelai menjadi tanaman penghasil bahan makanan penting di beberapa negara Asia, baik sebagai pakan ternak, penghasil minyak maupun penyubur tanah. Kedelai saat ini ditanam dari daerah utara dan selatan khatustistiwa

sampai 52° garis lintang, dan sering ditanam di daerah penanaman jagung, yang membutuhkan iklim dan kondisi tanah yang sama (Soesanto, 2015).

Kedelai dikonsumsi dengan beragam cara. Biji kedelai dapat dikonsumsi ketika masih hijau atau sebelum masak dan biji yang kering dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti untuk bahan pembuat kecap, susu, tempe dan tahu. Minyak kedelai juga dapat dikonsumsi dan banyak digunakan dalam dunia industri. Limbah kedelai setelah pengeskrakan minyak digunakan sebagai pakan ternak yang kaya protein (Soesanto, 2015).

Genus *Glycine* meliputi sekitar 20 spesies yang tersebar di daerah tropika dan subtropika Asia dan Australia, yang dibagi ke dalam dua subgenus: *Glycines* (musiman) dan *Soja* (tahunan) dengan kemudian menjadi 2 spesies: *Glycine Soja* Sieb & Zucc (jenis liar, terjadi di Asia Timur) dan *Glycine Max* (jenis yang dibudidayakan). *Glycine Soja* dipertimbangkan sebagai tetua liar dari *Glycine Max* selanjutnya 2 *taxa* menghibrida dengan mudah dan juga dipertimbangkan sebagai spesias tunggal dengan 2 sub spesies, yaitu *Glycine Max* (L) Merr subsp. *Soja* (Sieb & Zucc) Ohashi (Soesanto, 2015).

Sejumlah kultivar dikenal di daerah Asia Tropika beragam dalam waktu kemas, ukuran, kebiasaan tanaman, warna kandungan minyak dan protein dalam biji, serta kegunaannya. Terhadap produksi minyak, biji yang berwarna kuning lebih disukai dan biji yang belum masak digunakan sebagai sayur. Di Afrika Tropika, kultivar yang lebih tua asalnya dari Asia cenderung tinggi dan tidak berujung dalam kebiasaan tumbuhnya, perlu waktu lama untuk masak (sekitar 120 hari) dan menjanjikan dalam kemampuannya membentuk nodum

dengan *Rhizobium* asli tanah Afrika kultivar tersebut dapat dibandingkan dengan kultivar kedelai yang dihasilkan dari program pemuliaan tanaman dan cenderung pendek, tertentu, dan relatif cepat masak (70-90 hari) (Soesanto, 2015).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Analisis Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan dari individu, wilayah maupun suatu barang untuk menjadi lebih unggul dari yang lainnya. Dalam konsep ekonomi wilayah atau ekonomi regional yang dimaksud dengan daya saing adalah kemampuan suatu wilayah untuk untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Pada laporan daya saing global yang dikeluarkan oleh forum ekonomi dunia. Daya saing didefinisikan sebagai sebuah set dari institusi, kebijakan dan faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas sebuah negara “*The set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country*” (*Global Competitiveness Report (2012)* dalam Pratama (2015).

Daya saing ekonomi di suatu negara merupakan akumulasi dari daya saing setiap unit usaha yang ada dalam negara. Porter (2009) merumuskan daya saing tersebut sebagai kemakmuran ekonomi, dan sangat tergantung pada produktivitas penduduk bangsa, karena produktivitas dipandang sebagai determinan utama dalam jangka panjang bagi kenaikan standar hidup suatu bangsa. Dalam perspektif mikro, indikator daya saing suatu perusahaan dilihat dari tingkat harga relatif. Tingkat harga relatif yang semakin rendah, menunjukkan tingkat daya saing perusahaan yang semakin tinggi. Pengertian relatif harus diartikan dalam

kaitannya dengan berbagai atribut yang membentuk produk tertentu, baik kualitas, desain, harga, kenyamanan dan atribut lainnya. Dengan demikian, esensi daya saing adalah penurunan biaya produksi. Selanjutnya pada konteks regional, daya saing pertanian itu merupakan kemampuan suatu daerah untuk menumbuhkembangkan agribisnis dengan menyediakan fasilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan regulasi yang kondusif dalam pemanfaatan secara optimal sumberdaya daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani secara berkelanjutan di daerah tersebut (Simatupang (2016) *dalam* Dermoredjo, 2018).

Menurut Simanjuntak (1992) *dalam* Nurayati (2015) daya saing merupakan kemampuan suatu komoditi untuk bersaing di pasar luar negeri atau kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar dalam negeri dan bersaing dengan komoditas dari luar negeri. Jika suatu produk mempunyai daya saing maka produk banyak diminati oleh banyak konsumen. Simanjuntak menyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan.

Daya saing dapat diidentifikasi dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktivitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal maupun tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan, dan peningkatan teknologi (Porter (1990) *dalam* Nurayati, 2015). Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi dalam perusahaan komoditi tersebut,

keuntungan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sementara itu, efisiensi perusahaan komoditi dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.

Daya saing diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan komoditi dengan biaya yang relatif rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar kegiatan usaha dan produksi tersebut menguntungkan. Daya saing dalam perusahaan suatu komoditi dapat diketahui dari tingkat keuntungan yang diterima, baik berdasarkan harga privat maupun sosial. Keuntungan dari perusahaan tanaman diperoleh melalui penjualan hasil produksi (penerimaan) yang dikurangi dengan biaya total selama memproduksi. Selain itu, daya saing juga dapat diukur dari tingkat efisiensi dalam perusahaan komoditi tersebut dengan indikator yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif (Aprizal, 2013).

2.2.2 Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Dalam teori ini, Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Hukum keunggulan komparatif (*law of comparative advantage*) menyatakan bahwa perdagangan dapat dilakukan oleh negara yang tidak memiliki keunggulan absolut pada kedua komoditi yang diperdagangkan dengan melakukan spesialisasi produk yang kerugiannya absolutnya lebih kecil atau memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif tersebut dibedakan atas *cost*

comparative advantage (labor efficiency) dan *production comparative advantage (labor productivity)* (Firdaus (2011) dalam Karlinda, 2012).

Menurut teori *cost comparative advantage (labor efficiency)*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak efisien. Sementara itu, pada *production comparative advantage (labor productivity)* dapat dikatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut memproduksi lebih produktif serta mengimpor barang di mana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak produktif. Dengan kata lain, *cost comparative* menekankan bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara memproduksi suatu barang yang membutuhkan sedikit jumlah jam tenaga kerja dibandingkan negara lain sehingga terjadi efisiensi produksi (Firdaus (2011) dalam Karlinda, 2012).

Production comparative menekankan bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika seorang tenaga kerja di suatu negara dapat memproduksi lebih banyak suatu barang atau jasa dibandingkan negara lain sehingga tidak memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan demikian keuntungan perdagangan diperoleh jika negara melakukan spesialisasi pada barang yang memiliki *cost comparative advantage* dan *production advantage* atau dengan mengekspor barang yang keunggulan komparatifnya tinggi dan mengimpor

barang yang keunggulan komparatifnya rendah (Firdaus (2011) *dalam* Karlinda, 2012). Dengan kata lain, dalam teori keunggulan komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi.

Menurut Hady (2004) *dalam* Anggraini (2015) mengemukakan bahwa keunggulan komparatif adalah faktor SDM yang berteknologi tinggi dan berkualitas (faktor yang paling berperan dan selalu diperlukan untuk semua kelompok produk agar dapat memiliki keunggulan komparatif adalah faktor SDM yang berteknologi tinggi dan berkualitas.

2.2.3 Keunggulan Kompetitif

Teori keunggulan kompetitif pertama kali dikemukakan oleh Porter (1990) *dalam* (Sarwono, 2014) pada bukunya *Competitive Advantage of Nations*. Dalam teorinya Porter menjelaskan bahwa negara yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi antar perusahaan-perusahaan domestik akan mendorong terbentuknya keunggulan kompetitif pada suatu negara. Persaingan yang ketat pada perusahaan lokal ini di bentuk oleh empat atribut yaitu: (1) kondisi faktor, (2) kondisi permintaan, (3) industri terkait dan industri pendukung (4) strategi perusahaan, struktur dan persaingan. Keempat atribut tersebut saling berhubungan sehingga Porter menggambarannya dalam sebuah diamond, atau lebih dikenal dengan Porter's Diamond.

Kondisi faktor, yaitu posisi negara dalam faktor produksi, seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur, perlu untuk bersaing dalam suatu industri tertentu. Negara berkembang memiliki ciri ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja tidak terampil, tingkat upah yang rendah, dan kurangnya kapital. Hampir semua teknologi dipasok dan dikendalikan secara eksternal, serta belum berkembangnya infrastruktur, pasar modal, dan sistem pendidikan membuat produktivitas negara menjadi rendah. Dengan adanya persaingan faktor produksi dalam suatu industri maka negara berkembang dapat membangun ekonomi yang sukses.

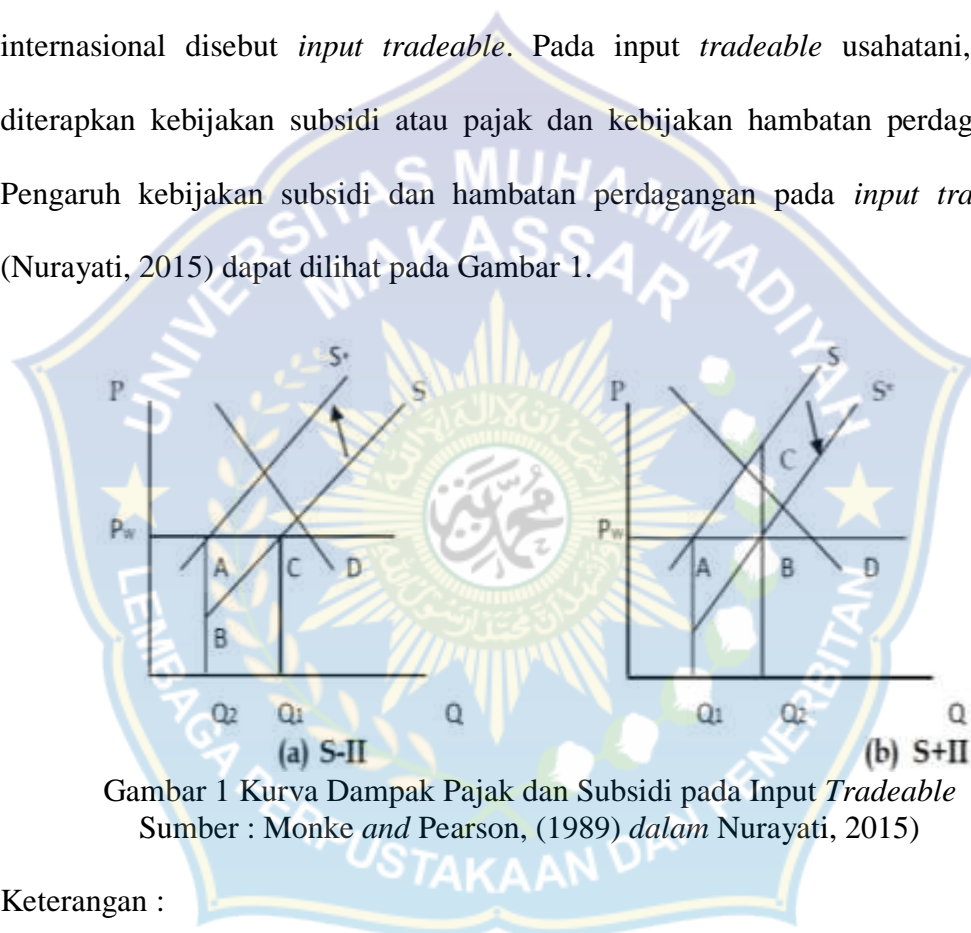
Kondisi Permintaan, yaitu sifat dari permintaan pasar domestik untuk barang dan jasa industri. Ciri pada negara berkembang dapat terlihat dari produk yang terdiferensiasi adalah menjadi andalan ekspor utama, permintaan lokal yang tidak canggih (informasi terbatas, seleksi yang terbatas, fokus terhadap harga), rancangan produk dan jasa bersifat imitasi atau lisensi dari luar, rendahnya standar produk, terjadi permintaan lokal yang tinggi.

Industri terkait dan industri pendukung, keberadaan atau ketiadaan industri pemasok dan industri terkait lainnya di negara tersebut yang secara internasional bersifat kompetitif. Ciri pada negara berkembang dapat dilihat dari industrinya yang berorientasi pada ekspor yang terisolasi, industri pendukung langka dan tidak kompetitif, mesin-mesin canggih dan peralatan yang modern didapat dari impor. Strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Kondisi dalam negara yang mengatur bagaimana perusahaan diciptakan, diatur, dan dikelola, sebagaimana juga sifat dari persaingan domestik.

2.2.4 Kebijakan Pemerintah

2.2.4.1 Kebijakan Terhadap Input *Tradable*

Sebagian besar komoditas pertanian diperdagangkan secara internasional. Dalam produksi komoditas pertanian juga terdapat komponen input produksi yang diperdagangkan secara internasional. Input produksi yang diperdagangkan secara internasional disebut *input tradeable*. Pada *input tradeable* usahatani, dapat diterapkan kebijakan subsidi atau pajak dan kebijakan hambatan perdagangan. Pengaruh kebijakan subsidi dan hambatan perdagangan pada *input tradeable* (Nurayati, 2015) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Kurva Dampak Pajak dan Subsidi pada Input *Tradeable*
Sumber : Monke and Pearson, (1989) dalam Nurayati, (2015)

Keterangan :

S – II : Pajak untuk *input tradeable*

S + II : Subsidi untuk *input tradeable*

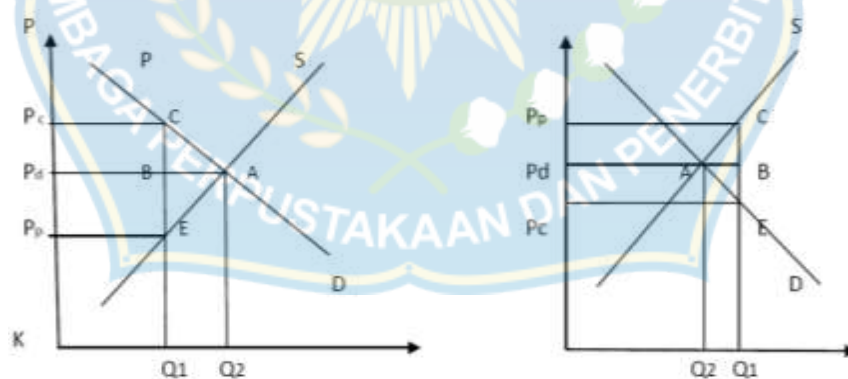
Gambar 1 (a) menunjukkan dampak pajak terhadap *input tradeable* yang digunakan. Pajak menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga pada tingkat harga output yang sama, output domestik turun dari Q_1 ke Q_2 dan kurva *supply* bergeser ke atas. Efisiensi ekonomi yang hilang dari produsen adalah A-B-C,

yang merupakan perbedaan antara nilai output yang hilang $Q1-C-A-Q2$ dengan biaya produksi output $Q2-B-C-Q1$.

Gambar 1 (b) memperlihatkan efek subsidi terhadap input *tradeable*. Subsidi menyebabkan harga input lebih rendah dan biaya produksi lebih rendah sehingga kurva *supply* bergeser ke bawah dan produksi naik dari $Q1$ ke $Q2$. Efisiensi ekonomi yang hilang dari produksi adalah $A-B-C$, yang merupakan pengaruh perbedaan antara biaya produksi setelah output meningkat yaitu $Q1-AC-Q2$ dan nilai output meningkat yaitu $Q1-A-B-Q2$.

2.2.4.2 Kebijakan Terhadap Input *Non-Tradable*

Kebijakan terhadap input *non tradeable* (input yang tidak diperdagangkan secara internasional/input domestik) dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan subsidi atau pajak (Nurayati, 2015). Pada gambar 2 dapat dilihat dampak mengenai kebijakan pajak dan subsidi yang diterapkan pada input *non tradeable*.



Gambar 2 Kurva Dampak Pajak dan Subsidi pada Input *Non Tradeable*

Sumber : Monke and Pearson, (1989) dalam (Nurayati, 2015)

Keterangan :

P_d : Harga domestik sebelum diberlakukan pajak dan subsidi

P_c : Harga ditingkat konsumen setelah pajak dan subsidi

P_p : Harga ditingkat produsen setelah pajak dan subsidi

$S - N$: Pajak untuk input *non tradeable*

$S + N$: Subsidi untuk input *non tradeable*

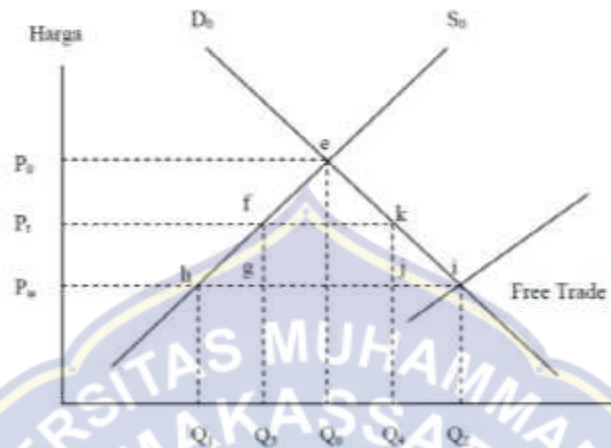
Pada Gambar 2 (a) terlihat bahwa sebelum diberlakukan pajak terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan penawaran input *non tradeable* berada pada P_d dan Q_2 . Adanya pajak sebesar $P_c - P_p$ menyebabkan produksi yang dihasilkan turun menjadi Q_1 . Harga ditingkat produsen turun menjadi P_p dan harga yang diterima konsumen naik menjadi P_c . Efisiensi ekonomi dari produsen yang hilang sebesar $B - E - A$ dan efisiensi konsumen yang hilang sebesar $B - C - A$.

Gambar 2 (b) menunjukkan bahwa sebelum diberlakukan subsidi terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan penawaran input *non tradeable* berada pada P_d dan Q_2 . Subsidi terhadap input *non tradeable* menyebabkan harga yang diterima produsen menjadi lebih tinggi (P_p), sedangkan harga yang dibayarkan konsumen menjadi lebih rendah (P_c). Efisiensi yang hilang dari produsen sebesar $A - C - B$ dan dari konsumen sebesar $A - B - E$.

2.2.4.3 Kebijakan Terhadap Output

Kebijakan terhadap output *tradeable* berupa subsidi maupun hambatan perdagangan diterapkan pada produsen yang mendatangkan produk impor. Kebijakan perdagangan internasional dikenakan pada komoditas pertanian yang masih impor seperti jagung dan kedelai. Pengenaan tarif atau pajak impor (bea masuk) bertujuan agar volume impor berkurang atau menambah biaya impor sehingga harga jual di dalam negeri menjadi lebih tinggi. Harga komoditas jagung dan kedelai yang tinggi diharapkan lebih bersaing dan usahatani menerima

pendapatan lebih tinggi. Meski demikian, dampak negatifnya konsumen harus membayar untuk dengan harga yang lebih mahal (Nurayati, 2015)



Gambar 3 Kurva Dampak Tarif Impor
Sumber : Salvatore, (1997) dalam (Nurayati, 2015)

Teori dampak kebijakan tarif impor Dominick Salvatore (1997) dan teori tarif impor menurut Krugman dan Obstfeld (2002) dalam Nurayati (2015) menerangkan dampak kebijakan tarif impor terhadap output *tradeable* seperti pada gambar 3 yaitu pada saat harga P_0 keseimbangan berada di titik e dimana perekonomian dalam kondisi autarki, tidak ada ekspor dan impor serta jumlah konsumsi sama dengan jumlah produksi. Pada saat harga P_w , perekonomian dalam kondisi *free trade* di mana produksi sebesar $0-Q_1$ dan konsumsi sama dengan $0-Q_2$ sehingga permintaan impor sebesar Q_1-Q_2 . Pemerintah memberlakukan tarif terhadap permintaan impor sehingga harga naik menjadi P_t . Besarnya tarif impor adalah P_t-P_w sehingga produksi meningkat menjadi $0-Q_3$, konsumsi menurun menjadi $0-Q_4$, dan permintaan impor berkurang menjadi Q_3-Q_4 . Dengan adanya pemberlakuan tarif ini, konsumen dirugikan karena harus menerima harga suatu komoditas lebih tinggi dari pada harga sebelum tarif.

Pemerintah memperoleh pendapatan sebesar tarif impor dikalikan dengan jumlah kuantitas impor setelah tarif ditetapkan, yakni sebesar $f-g-k-j$ dan pendapatan tambahan yang diterima oleh produsen dalam negeri sebesar P_w-P_{t-f-h} , sehingga kerugian bersih masyarakat (*dead weight loss*) akibat adanya pemberlakuan tarif tersebut sebesar $(h-f-g+j-k-i)$, dengan rincian $h-f-g$ merupakan kehilangan produsen (*producer loss*) dan $j-k-i$ merupakan kehilangan konsumen (*consumer loss*).

Kebijakan hambatan perdagangan berupa kuota juga diterapkan pada output atau komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Menurut Kindleberger dan Lindert (1978) dalam Nurayati (2015) kuota merupakan batas terhadap jumlah total impor yang diizinkan masuk ke negara setiap tahun. Pemberlakuan kuota impor pada umumnya dilandasi alasan sebagai jaminan kemungkinan kenaikan pengeluaran impor akibat persaingan perdagangan luar negeri yang makin buruk. Selain itu, penerapan kuota memberikan kekuatan dan fleksibilitas administrasi kepada pemerintah. Kebijakan kuota impor untuk komoditas beras, jagung dan kedelai pada umumnya dilakukan per bulan oleh pemerintah melalui kementerian dan perum Bulog. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga komoditas jagung dan kedelai dalam negeri.

2.2.4.4 Kebijakan yang Mempengaruhi Pertanian

Kebijakan pemerintah dilakukan guna mencapai tujuan dasar, yaitu efisiensi, pemerataan dan ketahanan. Efisiensi dapat diperoleh pada saat alokasi sumber daya yang langka dalam ekonomi menghasilkan sejumlah keuntungan yang maksimum dan alokasi barang dan jasa memberikan kepuasan tertinggi bagi

konsumen. Pemerataan yang diharapkan terjadi pada distribusi pendapatan antara berbagai golongan masyarakat di berbagai wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan. Sedangkan ketahanan, misal ketahanan pangan mengacu pada ketersediaan suplai pangan pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau (Pearson (2005) dalam Arfah, 2016).

kebijakan yang mempengaruhi pertanian dapat digolongkan kepada tiga kategori yaitu kebijakan harga, kebijakan makroekonomi dan kebijakan investasi publik. Ketiga kategori kebijakan tersebut dilakukan melalui instrumen seperti subsidi, hambatan perdagangan internasional dan pengawasan atau pengendalian langsung. Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Setiap kebijakan diterapkan untuk satu komoditas. Kebijakan harga juga bisa mempengaruhi input pertanian. Setiap instrumen kebijakan harga pertanian akan menimbulkan transfer antara produsen, konsumen dan pemerintah (Pearson (2005) dalam Nurayati, 2015). Ketiga kategori kebijakan tersebut yaitu :

1. Kebijakan Harga

Pajak dan subsidi atas komoditas pertanian menyebabkan terjadinya transfer anggaran pemerintah kepada produsen dan konsumen. Pajak mengalirkan sumberdaya kepada pemerintah, sedangkan subsidi mengalirkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah. Hambatan perdagangan internasional seperti pajak dan tarif yang sifatnya membatasi impor atau ekspor. Hambatan perdagangan dan kebijakan harga ini mengubah tingkat harga dalam negeri.

Pengendalian langsung adalah peraturan pemerintah atas harga marjin pemasaran atau hilangnya kebebasan untuk memilih tanaman. Biasanya kebijakan hambatan langsung harus disertai dengan kebijakan hambatan perdagangan dan kebijakan pajak/subsidi agar kebijakan tersebut bisa efektif.

2. Kebijakan Makro Ekonomi

Kebijakan makro ekonomi yang mempengaruhi sektor pertanian yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan harga faktor domestik, sumberdaya alam dan tataguna lahan. Pemerintah sering kali menerapkan kebijakan makro ekonomi yang bisa mempengaruhi nilai input produksi pertanian (sewa lahan, upah tenaga kerja, tingkat bunga yang berlaku). Kebijakan makro ekonomi tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi pertanian.

3. Kebijakan Investasi Publik

Kebijakan investasi publik yang mempengaruhi pertanian adalah investasi publik yang didanai dari anggaran pemerintah khususnya dibidang infrastruktur (barang modal seperti jalan, pelabuhan, jaringan irigasi dan lain-lain), sumberdaya manusia, serta penelitian dan pengembangan teknologi. Investasi dalam bentuk infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan usahatani atau menurunkan biaya produksi. Investasi publik dalam sumberdaya manusia antara lain pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan keahlian atau keterampilan serta kondisi kesehatan produsen dan konsumen. Contoh dalam bidang pertanian merupakan kegiatan penyuluhan pertanian. Investasi publik dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi seperti

penggunaan benih unggul, penemuan pupuk baru, teknik pengolahan pertanian baru dan lain-lain. Investasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Negara yang memiliki pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi biasanya melakukan investasi yang besar di bidang riset dan budaya pertaniannya untuk mengadopsi teknologi yang dihasilkan oleh lembaga riset internasional.

2.2.5 Input dan Output Pertanian

Fungsi produksi menghubungkan input dengan output. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu, atau sebaliknya jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Fungsi produksi ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan input atau output untuk setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan baku dan lain-lain (Arsyad, 2012).

Faktor produksi merupakan bahan baku yang digunakan selama proses menghasilkan barang dan jasa. Dalam kegiatan produksi usahatani tanaman pangan maka faktor produksi digunakan untuk menghasilkan produk pertanian yaitu lahan pertanian/tanah, sarana produksi pertanian (benih, bibit, pupuk, obat), modal dan tenaga kerja (Nurayati, 2015).

1. Lahan/ Tanah Pertanian

Lahan pertanian banyak diartikan sebagai tanah yang disiapkan untuk diusahakan usahatani misalnya sawah, legal dan pekarangan. Sedangkan tanah pertanian adalah tanah yang belum tentu diusahakan dengan usaha

pertanian. Ukuran luas lahan secara tradisional perlu dipahami agar dapat ditransformasi ke ukuran luas lahan yang dinyatakan dengan hektar. Disamping ukuran luas lahan, maka ukuran nilai tanah juga diperhatikan (Soekartawi (2005) dalam Remedy, 2015).

2. Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)

Sarana produksi pertanian mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam produksi komoditas pertanian. Saprotan terdiri dari benih/bibit, pupuk dan obat tanaman (pestisida, fungisida, dan lain-lain). Penggunaan saprotan akan menunjang produksi yang optimal secara kuantitas maupun kualitas. Penggunaan bibit yang baik, pupuk yang memadai dan obat tanaman dapat menghasilkan output produksi tanaman pertanian dalam jumlah banyak ataupun dengan kualitas yang baik (Nurayati, 2015).

3. Modal

Dalam proses produksi pertanian, modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal tidak bergerak (biasanya disebut modal tetap). Faktor produksi seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Sebaliknya modal tidak tetap atau modal variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produk dan habis dalam satu kali dalam proses produksi, misalnya biaya produksi untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja (Soekartawi (2005) dalam Remedy, 2015).

4. Tenaga Kerja

Faktor produksi tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi kualitas dan macam tenaga kerja perlu juga diperhatikan (Nurayati, 2015). Menurut Hermanto (1989) dalam Hanggraeni (2016), tenaga kerja dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak, dan tenaga kerja mekanik. Tenaga kerja manusia digolongkan menjadi tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tenaga kerja manusia dapat diperoleh dari dalam dan luar keluarga. Satuan ukuran yang umum dipakai untuk mengatur tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jam dan hari kerja total. Ukuran ini menghitung seluruh pencurahan kerja dari sejak persiapan sampai panen dengan menggunakan inventarisasi jam kerja (1 hari = 7 jam kerja) lalu dijadikan hari kerja total (HK total).
- b. Jumlah setara pria (*men equivalen*). Ukuran ini menghitung jumlah kerja yang dicurahkan untuk seluruh proses produksi diukur dengan ukuran hari kerja pria. Hal ini berarti menggunakan konversi tenaga kerja yaitu membandingkan tenaga pria sebagai ukuran baku dan jenis tenaga kerja lain dikonversikan atau disetarakan dengan pria, sebagai berikut: 1 pria sama dengan 1 hari kerja pria, 1 ternak sama dengan 2 hari kerja pria, 1 wanita sama dengan 0.7 hari kerja pria dan 1 anak sama dengan 0.5 hari kerja pria.

2.3 *Policy Analysis Matrix (PAM)*

Metode *Policy Analysis Matrix* merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya pada sistem komoditas. Empat aktivitas yang terdapat dalam sistem komoditi yang dapat dipengaruhi terdiri dari tingkat usahatani, distribusi dari usahatani ke pengolah, pengolahan, dan pemasaran secara keseluruhan dan sistematis. Isu-isu yang sering dibahas dalam PAM adalah (1) apakah sistem usahatani memiliki daya saing pada tingkat harga dan teknologi yang ada; (2) dampak investasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur baru, serta terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani; (3) dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian (Wibowo, 2013).

Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Matrix*, PAM) digunakan untuk menganalisis keadaan ekonomi dari pemilik ditinjau dari sudut usaha swasta (*private profit*) dan sekaligus memberi ukuran tingkat efisiensi ekonomi usaha atau keuntungan sosial (*social profit*). Menurut Monke dan Pearson (1989) dalam Aprizal (2013) model PAM memberikan pemahaman lebih lengkap dan konsisten terhadap semua pengaruh kebijakan dan kegagalan pasar pada penerimaan (*revenue*), biaya-biaya (*cost*), dan keuntungan (*profit*) dalam produksi sektor pertanian secara luas. Tiga *issues* yang yang menyangkut prinsip-prinsip yang ditelaah dengan model PAM yaitu :

1. Dampak kebijakan terhadap daya saing (*competitiveness*) dan tingkat profitabilitas pada tingkat usahatani.

2. Pengaruh kebijakan investasi pada tingkat efisiensi ekonomi dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*).
3. Pengaruh kebijakan penelitian pertanian pada perbaikan teknologi, selanjutnya model PAM merupakan produk dari dua identitas perhitungan yaitu :
 - a. Tingkat keuntungan atau profitabilitas merupakan perbedaan antara penerimaan dan biaya-biaya.
 - b. Pengaruh penyimpangan atau divergensi (distorsi kebijakan dan kegagalan pasar) merupakan perbedaan antara parameter-parameter yang seharusnya ada terjadi jika divergensi tersebut dihilangkan.

Untuk menganalisis sejauh mana daya saing usahatani dilakukan pendekatan terhadap penggunaan sumber daya domestik (*non tradable*) dan *input tradable*. Metode analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM) yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau dampak intervensi dalam perusahaan berbagai aktivitas usahatani secara keseluruhan dan sistematis. Analisis ini dapat digunakan pada sistem komoditas dengan berbagai wilayah, tipe usahatani dan teknologi. Selain itu analisis PAM juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat memperbaiki daya saing terhadap perusahaan suatu komoditi yang dihasilkan melalui penciptaan efisiensi usaha dan pertumbuhan pendapatan (Aprizal, 2013).

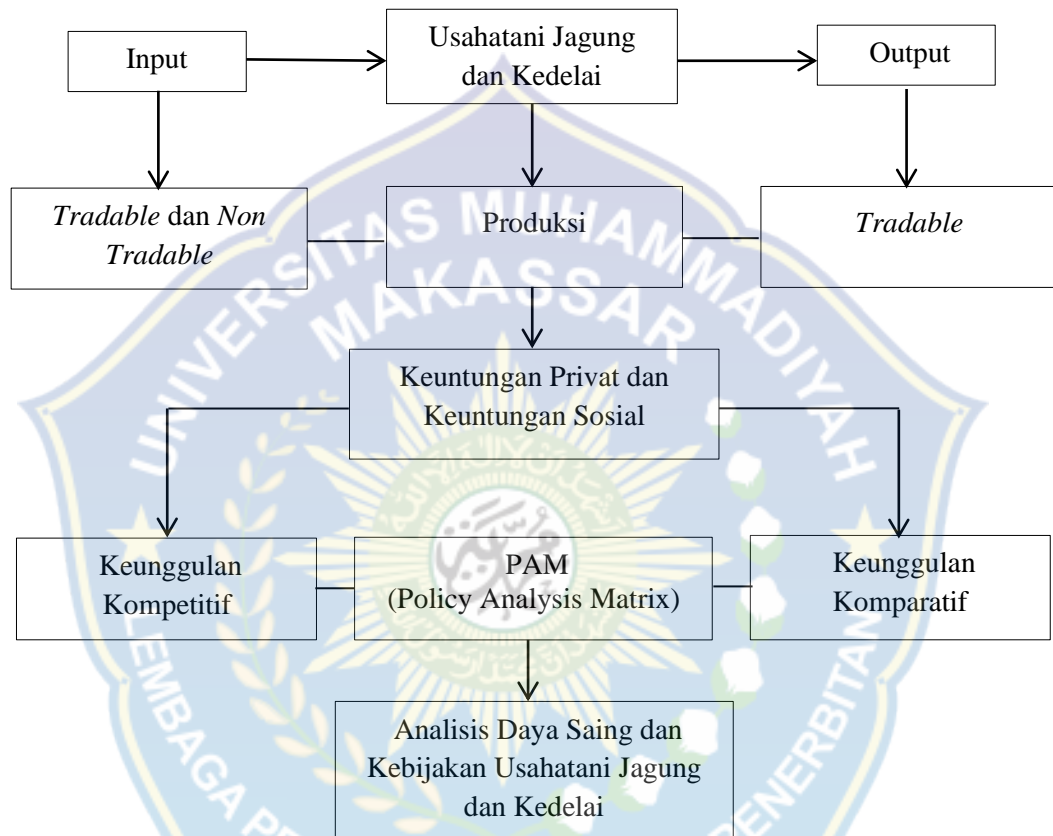
Menurut Monke and Pearson (1989) dalam Aprizal (2013), ada beberapa asumsi mendasar yang digunakan dalam membangun matriks PAM :

1. Perhitungan berdasarkan harga privat (*privat cost*), yaitu harga yang benar-benar terjadi dan diterima oleh produsen dan konsumen atau harga yang benar-benar terjadi setelah adanya kebijakan.
2. Perhitungan berdasarkan harga sosial (*sosial cost*) atau Harga bayangan (*shadow price*), yaitu harga pada kondisi pasar persaingan sempurna atau harga yang terjadi apabila tidak ada kebijakan. Pada komoditas yang dapat diperdagangkan (*tradable*), harga bayangan adalah harga yang terjadi di pasar Internasional.
3. Output bersifat *tradable* dan input dapat dipisahkan ke dalam komponen asing (*tradable*) dan domestik (*non tradable*).
4. Eksternalitas positif dan negatif dianggap saling meniadakan.

2.4 Kerangka Pikir

Komoditas pertanian merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional, termasuk komoditas jagung dan kedelai. Selain beras, bahan pangan yang menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia adalah jagung dan kedelai. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang tinggi Indonesia masih melakukan impor. Namun disisi lain Indonesia juga memproduksi jagung dan kedelai. Produksi terbesar jagung di Indonesia berada di beberapa daerah yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi sentra produksi kedelai di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan DI. Yogyakarta.

Keberadaan komoditas jagung dan kedelai impor dan di pasar yang sama, menyebabkan komoditas saling bersaing agar dapat bertahan dalam pasar dan diminati konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dikaji daya saing jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan.



Gambar 4 : Skema Kerangka Pikir Analisis Daya Saing Usahatani Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja karena daerah penelitian merupakan salah satu daerah sentra pengasil jagung dan kedelai terbesar di Indonesia.

3.2 Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari lembaga pemerintahan Sulawesi Selatan maupun dunia yang bersumber dari data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia dan World Bank. Keseluruhan sampel berupa data tahunan (t). Sampel yang digunakan ditentukan berupa sampel kecil yaitu data terbaru yang diperoleh dari tahun 2017, 2018 dan 2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari buku, skripsi, jurnal, tesis, Badan Pusat statistik Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicantumkan bersumber dari beberapa literatur yang disinkronkan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut buku, skripsi, jurnal, tesis, Badan Pusat statistik Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian, *World Bank* dan Bank Indonesia yang merupakan data sekunder.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses aktivitas berpikir yang dilakukan dalam mengumpulkan sumber data mengenai bentuk permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan sebuah informasi baru. Analisis data dimulai dari mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dari data atau informasi yang terkumpul dipilah-pilah data yang sesuai dengan pembahasan, selanjutnya menguraikan data dan fakta menjadi sebuah paragraf deskriptif.

Pada penelitian ini digunakan pendekatan Analisis Matriks Kebijakan (*Policy Analysis Matrix*). Dengan pendekatan ini, dapat dilihat bagaimana keunggulan kompetitif (efisiensi finansial) dan keunggulan komparatif (efisiensi ekonomi) dari komoditas jagung dan kedelai.

Tabel 4. *Policy Analysis Matrix* (PAM)

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input <i>Tradeable</i>	Input <i>Non-Tradeable</i>	
Harga Privat	A	B	C	$D=A-(B+C)$
Harga Sosial	E	F	G	$H=E-(F+G)$
Dampak Kebijakan/ Divergensi	$I=A-E$	$J=B-F$	$K=C-G$	$L=D-H$

Sumber : Scott Pearson, *et al* (2005) dalam Nurayati (2015)

Keterangan

Penerimaan usahatani pada harga privat = A

Total biaya input *tradeable* usahatani pada harga privat = B

Total biaya input *non tradeable* usahatani pada harga privat = C

Penerimaan usahatani pada harga sosial = E

Total biaya input *tradeable* usahatani pada harga sosial = F

Total biaya input *non tradeable* usahatani pada harga sosial = G

Keuntungan privat = D

Keuntungan sosial = H

Transfer output (OT) = I

Transfer input (IT) = J

Transfer faktor (TF) = K

Transfer bersih (NT) = L

Baris pertama dari matrik PAM pada tabel 4 adalah perhitungan dengan harga pasar (privat), yaitu harga yang secara aktual diterima dan dibayarkan petani. Baris kedua merupakan penghitungan yang didasarkan pada harga sosial, yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial yang sesungguhnya bagi unsur biaya

maupun hasil. Harga sosial merupakan harga tanpa kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar. Baris ketiga merupakan selisih perhitungan dari harga privat dengan harga sosial sebagai dampak dari kebijakan.

Tabel PAM dapat menghasilkan indikator profitabilitas, daya saing dan dampak kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas yang dianalisis adalah keuntungan privat dan keuntungan sosial. Indikator daya saing usahatani yang dianalisis adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Indikator kebijakan pemerintah yang diterima usahatani dapat dianalisis melalui Indikator kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan input-output dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam matrik PAM. Indikator profitabilitas, daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas antara lain:

1. Profitabilitas dan Daya Saing

Profitabilitas usahatani dilihat dari keuntungan privat dan keuntungan sosial. Daya paing usahatani dapat dilihat melalui keunggulan kompetitif dan komparatifnya.

- 1) Keuntungan privat dan keunggulan kompetitif didasarkan pada biaya dan pendapatan privat dalam perekonomian aktual. Keunggulan Kompetitif dapat dihitung melalui keuntungan privat dan Indikator *Private Cost Ratio* (PCR).
 - a. Keuntungan privat merupakan keuntungan yang sebenarnya diperoleh petani. Keuntungan privat dihitung berdasarkan harga privat. Keuntungan privat dalam tabel PAM disimbolkan dengan D.

Indikatornya apabila D positif, berarti usahatani memperoleh keuntungan atau profit atas biaya normal dalam kondisi terdapat kebijakan pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi bahwa komoditi tersebut mampu ekspansi, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau adanya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan. Apabila D negatif, usahatani tersebut tidak memperoleh profit atas biaya normal yang artinya bahwa usahatani belum mampu ekspansi.

b. *Private Cost Ratio* (PCR) menunjukkan penggunaan sumber daya domestik untuk menghasilkan nilai tambah usahatani. Indikator PCR didapat dari biaya privat input *non tradeable* usahatani dibandingkan pendapatan privat domestik dikurangi biaya input *tradeable* privat. PCR dapat dihitung dari notasi dalam tabel PAM = $C/(A-B)$. Indikatornya adalah apabila $PCR < 1$, usahatani yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif $PCR > 1$, sistem input *tradeable* yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif.

2) Keuntungan sosial dan keunggulan komparatif didasarkan pada biaya dan pendapatan sosial, oleh karena itu keuntungan sosial dan keunggulan kompetitif mencerminkan efisiensi usahatani. Keuntungan sosial dan keunggulan komparatif dapat dihitung melalui keuntungan sosial dan indikator *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR).

a. Keuntungan sosial merupakan keuntungan yang seharusnya diterima petani apabila tidak ada kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar. Keuntungan sosial pada tabel PAM disimbolkan dengan H .

Indikatornya adalah apabila H positif, usahatani tetap menguntungkan meski tidak ada kebijakan pemerintah. Apabila H negatif, berarti usahatani tidak menguntungkan dan tidak mampu bersaing tanpa kebijakan pemerintah.

- b. Indikator yang menggambarkan rasio penggunaan faktor domestik yaitu *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) dilihat dari nilai *Domestic Resource Cost* (DRC) yang dihitung dari identitas $G/(E-F)$ pada tabel PAM. Indikatornya apabila $DRC < 1$, usahatani mempunyai keunggulan komparatif. Apabila $DRC > 1$, usahatani tidak mempunyai keunggulan komparatif.

2. Analisis Kebijakan

★ Analisis kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usahatani padi, jagung dan kedelai Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan input - output.

- 1) Kebijakan Output dapat dilihat dari indikator Output Transfer (OT) dan *Nominal Protection Coefficient On Output* (NPCO). Kedua kebijakan output ini berasal dari notasi penerimaan privat dan sosial (A & E) pada tabel PAM. Kebijakan Output terdiri dari :

- a. Output Transfer dihitung dari selisih penerimaan privat dan penerimaan sosial ($OT = A - E$). Indikatornya apabila OT positif, menunjukkan terdapat transfer kepada usahatani sehingga surplus usahatani meningkat. Sebaliknya OT negatif, adanya transfer kepada konsumen sehingga surplus konsumen meningkat.

b. *Nominal Protection Coefficient On Output* (NPCO) dihitung dari perbandingan identitas penerimaan privat dengan penerimaan sosial (A/E) pada tabel PAM. Indikatornya apabila $NPCO > 1$, kebijakan telah mampu memproteksi usahatani atau produsen komoditas. Apabila $NPCO < 1$ kebijakan belum mampu memproteksi usahatani atau produsen komoditas.

2) Kebijakan Input terdiri dari kebijakan *Input Transfer* (IT), *Nominal Protection Coefficient on Tradeable Input* (NPCI) & *Transfer Factor* (TF).

a. Input transfer (IT) dihitung dari selisih notasi biaya input privat *tradeable* dan notasi biaya input sosial *tradeable* (B-F). Indikatornya apabila IT positif, menunjukkan terdapat transfer dari petani ke produsen input *tradeable*. Apabila IT negatif menunjukkan terdapat transfer dari produsen input *tradeable* kepada petani.

b. *Protection Coefficient on Tradeable Input* (NPCI) dihitung dari perbandingan notasi biaya input privat *tradeable* dan notasi biaya input sosial *tradeable* (B/F). Indikatornya apabila $NPCI < 1$, berarti kebijakan bersifat protektif terhadap usahatani yaitu konsumen input *tradeable* berupa subsidi terhadap input *tradeable*. Apabila $NPCI > 1$, kebijakan tidak protektif terhadap usahatani atau tidak ada kebijakan subsidi terhadap input *tradeable*.

c. Transfer faktor (TF) dihitung dari selisih notasi biaya input *non tradeable* privat dan input *non tradeable* sosial pada tabel PAM (CG).

Indikatornya apabila TF positif, berarti terdapat transfer dari petani produsen kepada produsen input *non tradeable* begitu pula sebaliknya. Transfer faktor juga dapat terjadi karena kegagalan pasar pada input *non tradeable* dan karena *social opportunity cost of land*

3) Kebijakan Input-output terdiri dari kebijakan *Effective Protection Coefficient* (EPC), *Net Transfer*, *Profitability Coefficient* dan *Subsidi Ratio to Producer*.

a. *Effective Protection Coefficient* (EPC) dihitung dari notasi $(A-B)/(E-F)$ pada tabel PAM. Indikatornya apabila $EPC > 1$, gabungan atau keseluruhan kebijakan telah mampu memproteksi usahatani. Apabila $EPC < 1$, gabungan atau keseluruhan kebijakan belum mampu memproteksi usahatani.

b. *Net transfer* (NT) dihitung dari selisih antara identitas keuntungan privat dengan keuntungan sosial (D-H). Indikatornya apabila NT positif, menunjukkan tambahan surplus usahatani secara keseluruhan. Apabila NT negatif, menunjukkan berkurangnya surplus usahatani secara keseluruhan.

c. *Profitability Coefficient* (PC) dihitung dari perbandingan antara identitas keuntungan privat dengan keuntungan sosial (D/H). Indikatornya apabila $PC > 1$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah telah mampu memberikan proteksi kepada usahatani. Apabila $PC < 1$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah belum mampu memberikan proteksi kepada usahatani.

d. *Subsidi Ratio to Producer* (SRP) dihitung dari perbandingan identitas keuntungan divergensi dibanding dengan penerimaan sosial (L/E). $SRP < 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbangannya untuk berproduksi (*opportunity cost*). $SRP = 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku tidak menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari imbangannya untuk berproduksi, sedangkan jika $SRP > 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbangannya untuk berproduksi.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan persamaan persepsi sehingga terdapat persamaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Pentingnya definisi operasional dibahas karena terdapat banyak istilah-istilah berbeda yang digunakan untuk menyebutkan isi atau maksud yang sama, atau sebaliknya istilah-istilah yang sama dipergunakan untuk menyebutkan isi atau maksud yang berbeda.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Usahatani jagung adalah suatu proses atau aktivitas untuk memproduksi jagung di Sulawesi Selatan.
2. Usahatani kedelai adalah suatu proses atau aktivitas untuk memproduksi kedelai di Sulawesi Selatan.

3. Input *tradeable* merupakan input yang diperdagangkan dipasar internasional. Input *tradable* dalam usahatani jagung dan kedelai berupa benih, pupuk dan pestisida.
4. Input *non tradeable* merupakan input yang hanya diperdagangkan dipasar domestik. Input *non tradable* dalam usahatani jagung dan kedelai berupa
5. Produksi adalah jumlah hasil yang diperoleh petani dari kegiatan usahatani berupa jagung dan kedelai per musim tanaman diukur dengan satuan ton.
6. Luas panen adalah luas tanaman jagung dan kedelai yang dipungut hasilnya.
7. *Policy analysis matrix* (PAM) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar dalam keuntungan privat dan keuntungan sosial dari sistem usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi selatan dan dalam efisiensi penggunaan sumberdaya.
8. Keunggulan komparatif adalah keunggulan Sulawesi selatan dalam memproduksi jagung dan kedelai dengan biaya alternatif yang dikeluarkan lebih rendah dari biaya untuk komoditas yang sama di daerah yang lain dan diukur berdasarkan harga sosial.
9. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan suatu komoditas yang dihasilkan dalam kegiatan produksi yang efisien sehingga memiliki daya saing di pasar lokal maupun internasional yang diukur berdasarkan harga privat.
10. Harga sosial (harga efisiensi) merupakan harga yang seharusnya dibayar oleh petani apabila tidak ada kebijakan pemerintah pada masing-masing input dan output.

11. Harga Privat (harga pasar) merupakan harga yang secara aktual dikeluarkan dan diterima oleh petani.
12. Daya saing usahatani jagung dan kedelai adalah kemampuan usahatani untuk tetap layak secara finansial (privat) pada kondisi teknologi usahatani, lingkungan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang ada.
13. Penerimaan usahatani jagung adalah hasil perkalian antara jumlah produksi jagung dengan harga jual jagung yang diterima petani, diukur dalam satuan rupiah (Rp).
14. Penerimaan usahatani kedelai adalah hasil perkalian antara jumlah produksi jagung dengan harga jual kedelai yang diterima petani, diukur dalam satuan rupiah (Rp).
15. Keuntungan usahatani jagung dan kedelai adalah penerimaan dari usahatani dikurang dengan input *tradable* dan input *non tradable*.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0° 12' - 8° Lintang Selatan dan 116° 48' - 122° 36' Bujur Timur. Jumlah sungai yang mengalir di wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai, yaitu Sungai Saddang yang mengalir melalui Kabupaten Tator, Enrekang, dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau, yaitu Danau Tempe, dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Luwu Wajo serta Danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah gunung tercatat sebanyak tujuh gunung, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Rantemario dengan ketinggian 3.470 mdpl. Gunung ini berdiri tegak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Luwu.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.71,48 km² yang meliputi 20 kabupaten dan 3 kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km² atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,46% dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Batas wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan letak astronomis:

Sebelah Utara	: Sulawesi Barat
Sebelah Timur	: Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara
Sebelah Barat	: Selat Makassar
Sebelah Selatan	: Laut Flores

Berdasarkan letak geografisnya Sulawesi Selatan terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada pada persimpangan jalur lalu lintas penumpang, perdagangan barang dan jasa dari kawasan barat Indonesia (KBI) ke kawasan timur Indonesia (KTI) sehingga sering disebut Kawasan Timur Indonesia. Sulawesi Selatan mempunyai dua kabupaten kepulauan, yakni Kepulauan Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan Pendataan Potensi Desa (Podes) sejak tahun 1980. Sejak saat itu, podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 10 tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Sejak tahun 2008, pendataan podes mengalami perubahan dengan adanya penambahan kuisioner suplemen kecamatan dan kabupaten/kota. Penambahan kuisioner tersebut bertujuan untuk meningkatkan manfaat data podes bagi para konsumen data dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Data podes merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang muatannya beragam dan memberi gambaran tentang situasi pembangunan suatu wilayah (regional). Berbeda dengan data dari hasil pendekatan rumah tangga yang lebih menekankan pada dimensi aktivitas sektoral. Keduanya sama penting dan menjadi kekayaan BPS.

Cakupan wilayah pencacahan Podes dilakukan dengan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa (yaitu desa, kelurahan, nagari, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Berdasarkan hasil podes 2014, di Sulawesi Selatan ada sebanyak 82.190 wilayah setingkat desa yang tersebar di 511 kabupaten/kota. Metode pengumpulan data Podes 2014 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan. Petugas adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS kabupaten/kota, sementara narasumber adalah kepala desa/lurah atau narasumber lain yang memiliki pengetahuan terhadap wilayah target pencacahan.

provinsi Sulawesi Selatan dan pada umumnya daerah di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Berdasarkan pengamatan di tiga Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama tahun 2016 rata-rata suhu udara 27,6°C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan suhu yang nyata. Suhu udara maksimum di Stasiun Klimatologi Hasanuddin 36,2°C dan suhu minimum 28,4°C.

4.2 Kondisi Demografis

Sumber utama kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census* pencatatan penduduk menggunakan konsep *usual residence*, yaitu konsep dimana penduduk yang menetap di suatu wilayah dalam waktu yang lama akan dicacah berdasarkan tempat mereka menetap sedangkan penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap atau tidak menetap akan dicacah di wilayah mereka ditemukan oleh petugas sensus, termasuk tuna wisma, awak kapal bendera Indonesia, penghuni perahu/ rumah apung, masyarakat terpencil/ terasingkan dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk.

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 menggunakan data dasar penduduk.

1. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
3. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk perkilometer persegi.
4. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
5. Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintah.
6. Persebaran penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya. Contoh: penduduk menurut kelompok umur dan penduduk menurut jenis kelamin.
7. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurus kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

8. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
9. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah orang dalam rumah tangga per rumah tangga. Istilah migrasi seumur hidup disebut bila provinsi tempat tinggal seseorang pada saat pencacahan berbeda dengan provinsi tempat lahirnya. Istilah migrasi risen disebut bila tinggal seseorang berbeda pada saat pencacahan berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya 5 tahun lalu.
10. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
11. Angka kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
12. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
13. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.
14. Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yang tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut serta tidak

menggunakan pekerja dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

15. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan yang tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki atasan tetap jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga maka boleh lebih dari satu.
16. Pekerja bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga. Di non-pertanian atas dasar balas jasa maupun dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sisten pembayaran harian maupun borongan.
17. Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja maupun membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji baik berupa uang ataupun barang.

Hasil publikasi Bank Indonesia bahwa Sulawesi adalah pulau dengan luas daratan 62.362,55 km² dengan jumlah penduduk 8.213.864 (tahun 2004) dan memiliki relief berupa jazirah-jazirah yang panjang serta pipih yang ditandai fakta

bahwa tidak ada titik daratan yang jauhnya melebihi 90 km dari batas pantai. Kondisi yang demikian menjadikan pulau Sulawesi memiliki garis pantai yang panjang dan sebagian daratannya bergunung-gunung.

Kombinasi ini menghamparkan alam yang mempesona dipandang baik dari daerah pesisir maupun daerah ketinggian. Sekitar 30.000 tahun silam, pulau Sulawesi telah dihuni oleh manusia. Peninggalan peradaban di masa tersebut ditemukan di gua-gua bukit kapur daerah Maros kurang lebih 30 km dari Makassar, ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Peninggalan prasejarah lainnya yang berupa alat batu pebble dan flake serta fosil babi dan gajah yang telah punah, dikumpulkan dari teras sungai di Lembah Wallanae, diantara Soppeng dan Sengkang, Sulawesi Selatan.

Pada masa keemasan perdagangan rempah-rempah di abad ke – 15 sampai dengan abad ke – 19, Kerajaan Bone dan Makassar yang perkasa berperan sebagai pintu gerbang ke pusat penghasil rempah, Kepulauan Maluku. Sejarah itu telah memantapkan opini bahwa Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat strategis bagi perkembangan Kawasan Timur Indonesia.

Penduduk Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku utama yaitu Toraja, Bugis, Makassar, dan Mandar. Suku Toraja terkenal memiliki keunikan tradisi yang tampak pada upacara kematian, rumah tradisional yang beratap melengkung dan ukiran cantik dengan warna natural. Sedangkan suku Bugis, Makassar dan Mandar terkenal sebagai pelaut yang patriotik. Dengan perahu layar tradisionalnya pinisi, mereka menjelajah sampai ke utara Australia, beberapa pulau di Samudra Pasifik, bahkan sampai ke pantai Afrika.

Hasil penelitian sejarawan Australia Utara bernama Peter G. Spillet M, mengungkapkan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa orang Sulawesi Selatanlah yang pertama mendarat di Australia dan bukannya Abel Tasman (Belanda) atau James Cook (Inggris) tahun 1642. Upaya pelurusan fakta sejarah tersebut dilakukan Peter yang kemudian dijuluki Daeng Makulle dengan sangat hati-hati melalui jejak, buku-buku sejarah berupa hubungan orang Makassar dengan orang Aborigin (Merege). Orang Makassar tiba di sana dengan menggunakan transportasi perahu.

4.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Kota Makassar menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk yang meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Makassar 1.342.826 jiwa, tahun 2014 laju pertumbuhan meningkat 1,57% menjadi 1.429.242 jiwa, akan tetapi pada tahun 2016 pertumbuhan penduduk mengalami penurunan 1,39% hingga jumlah penduduknya hanya 1.469.601 jiwa.

Rasio jenis kelamin yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 95,5% dengan jumlah laki-laki 4.204.110 jiwa dan perempuan 4.402.265 jiwa. Rasio jenis kelamin paling banyak berada di Tanah Toraja dengan jumlah rasio 102,30%, akan tetapi jumlah jenis kelamin perempuan dan laki-laki paling banyak dimiliki oleh Kabupaten Bone. Kepadatan penduduk di Sulawesi Selatan terbanyak di tingkat kota yaitu Kota Makassar dengan jumlah 8.248/km², hal ini

tentu saja dapat terjadi dengan melihat perkembangan kota Makassar sebagai kota metropolitan dan semakin banyak masyarakat yang berpindah dari daerah ke kota membuat pusat kota menjadi padat penduduk. Ditingkat kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kabupaten Takalar dengan jumlah 506/ km². Hal ini tentu membuat Kabupaten Takalar menjadi padat karena luas daerahnya berukuran kecil.

4.2.2 Ketenagakerjaan

Lapangan pekerjaan utama yaitu pertama : pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; kedua : pertambangan dan penggalian; ketiga : industri pengolahan dan air, keempat : bangunan, kelima : perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel; keenam: angkutan, pergudangan dan komunikasi; ketujuh : keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan; kedelapan : jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (*community, social and personal service*). Dari pekerjaan tersebut yang paling sedikit diminati laki-laki berumur 15 tahun adalah bidang industri pengolahan dan air, sedangkan bagi perempuan berusia 15 tahun semua rata-rata bekerja diberbagai bidang.

Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan sekolah dasar tingkat peminat paling sedikit bagi laki-laki, namun bagi perempuan tingkat pendidikannya dan peminatnya memiliki jumlah yang sama. Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar minimal pengupah oleh pengusaha atau pimpinan kepada seluruh karyawannya berdasarkan pada keterangan disuatu daerah tertentu. UMR Hari dan UMR Bulan setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

Jam kerja seluruh dan jam kerja utama penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang paling sedikit peminatnya yaitu 15-24 jam, sedangkan bagi perempuan semua jam kerja sama banyak peminatnya. Status kerja penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang paling sedikit peminatnya yaitu buruh tetap dan bagi perempuan semua pekerjaan sama banyak peminatnya.



Tabel 5. Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2017.

No.	Kabupaten/ Kota	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Km ²	%	Jumlah	%	Orang/ Km ²
1	Kepulauan Selayar	1.1999,91	2,6	127.220	1,52	106
2	Bulukumba	1.170,10	2,54	404.896	4,85	346
3	Bantaeng	397,06	0,86	181.006	2,17	456
4	Jeneponto	837,99	1,82	351.111	4,21	419
5	Takalar	620,26	1,35	280.590	3,36	452
6	Gowa	1.802,08	3,91	696.096	8,34	386
7	Sinjai	924,15	2,01	234.886	2,82	254
8	Maros	1.538,44	3,34	331.796	3,98	216
9	Pangkep	814,95	1,77	317.110	3,8	389
10	Barru	1.192,39	2,59	169.302	2,03	142
11	Bone	4.593,38	9,97	734.119	8,8	160
12	Soppeng	1.337,99	2,9	225.512	2,7	169
13	Wajo	2.394,15	5,2	390.603	4,68	163
14	Sidrap	2.081,01	4,52	283.307	3,4	136
15	Pinrang	1.892,42	4,11	361.293	4,33	191
16	Enrekang	1.821,41	3,95	196.394	2,35	108
17	Luwu	2.940,51	6,38	242.793	4,12	117
18	Tana Toraja	2.149,67	4,66	226.212	2,71	105
19	Luwu Utara	7.365,51	15,98	297.313	3,56	40
20	Luwu Timur	7.315,77	15,87	263.012	3,15	36
21	Toraja Utara	1.169,95	2,54	222.393	2,67	190
22	Makassar	181,35	0,39	1.408.072	16,88	7.764
23	Pare-Pare	88,92	0,19	135.192	1,62	1.152
24	Palopo	254,57	0,55	160.819	1,93	632
Sulawesi Selatan		46.083,94	100	8.342.047	100	181

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

4.3 Kondisi Pertanian

Berdasarkan RENJA (Rencana Kerja) 2015 bahwa pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura harus dapat tumbuh dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga mampu berperan dalam penyediaan pangan bagi penduduk, penyediaan bahan baku industri, peningkatan pendapatan petani, penyerapan lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan devisa melalui ekspor hasil komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Hingga saat ini Provinsi Sulawesi Selatan diketahui sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia dan telah memberikan kontribusi sangat besar tidak hanya bagi masyarakat Sulawesi Selatan tapi juga memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap produksi pangan nasional.

Terdapat beberapa komoditi pertanian yang menjadi komoditi unggulan untuk Sulawesi Selatan yaitu padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kakao, jambu mente, lada, cengkeh, kemiri, udang windu, rumput laut, kepiting, ikan tuna, kerapu, teripang, kayu olahan, rotan, sapi, ayam ras dan ayam buras menurut lembaga Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal, Komoditi-komoditi tersebut dikelompokkan ke dalam 5 subsektor yang meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor peternakan dan subsektor kehutanan.

Jumlah lahan irigasi lebih banyak dibanding sawah non irigasi, daerah irigasi seluas 390.768 Km² sedangkan daerah non irigasi seluas 258.422 Km². Pinrang merupakan kabupaten yang paling banyak melakukan irigasi dan paling sedikit berada di Wajo dengan luas 69.635 Km². Luas keseluruhan kebun yang dimiliki Sulawesi Selatan yaitu 501.918.

Populasi sapi potong terbanyak berada di Kabupaten Bone dengan jumlah 395.308 ekor, populasi sapi perah paling banyak berasal dari Kabupaten Enrekang dengan jumlah 1.323 ekor, populasi kerbau terbanyak di Tana Toraja dan jumlah domba terbanyak berada dari Kabupaten Jenepono. Ada 8 jenis unggas yang dipelihara di Sulawesi Selatan salah satunya ayam pedaging dengan 48.203.640 ekor.

Rumah tangga perikanan laut tahun 2014 sebanyak 36.955 kepala keluarga, lalu mengalami penurunan tahun 2015 menjadi 31.441, sedangkan perikanan umum tahun 2014 mencapai 8.362 kepala keluarga dan menurun ditahun 2015 menjadi 6.725 kepala keluarga. Rumah tangga perikanan budidaya terbagi menjadi 6 yaitu budidaya laut, tambak, kolam, sawah, jaring apung tawar dan jaring apung laut. Jumlah keseluruhan budidaya perikanan yaitu 112.088 kepala keluarga. Nilai produksi perikanan tangkap adalah 9.179.183.650,00 lalu luas area pemeliharaan ikan adalah 176.869.54 Km².

Produksi kayu hutan berdasarkan jenisnya yaitu kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis yang produksinya tetap setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan terbesar pada tahun 2006 pada kawasan hutan dalam seluas 1.676.30 Km² dan kawasan hutan luar seluas 281.80 Km².

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Daya Saing

Keuntungan usahatani jagung dan kedelai pada penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Keuntungan privat yang didasarkan pada harga aktualnya atau harga yang diterima petani, keuntungan sosial merupakan keuntungan berdasarkan harga sosial, dimana harga sosial atau harga bayangan adalah harga yang sesungguhnya pada pasar persaingan sempurna dan harga tersebut tidak mendapat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar. Harga sosial ini mencerminkan harga yang sesungguhnya dari input yang digunakan dalam kegiatan usahatani dan harga output yang sesungguhnya. Kebijakan pemerintah dalam usahatani jagung dan kedelai diantaranya subsidi pupuk, subsidi bunga kredit dan kebijakan tarif impor sebesar 5%. Dalam perhitungan sosial, semua kebijakan-kebijakan dihilangkan dari komponen harga.

5.1.1 Analisis Daya Saing Usahatani Jagung

Tabel 6. Keuntungan Privat dan Sosial Usahatani Jagung di Sulawesi Selatan Per Musim per ha (Rp.000), Tahun 2017

Komponen	Biaya			Keuntungan (Rp/ha)
	Penerimaan (Rp/ha)	Input <i>Tradable</i>	Input <i>Non-Tradable</i>	
Privat	14.385.530	2.122.000	4.856.000	7.407.530
Sosial	16.818.899	3.563.000	5.719.000	7.536.899
Divergensi	-2.433.369	-1.441.000	-863.000	129.369

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 6 indikator profitabilitas usahatani menunjukkan keuntungan positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keuntungan privat/keuntungan finansial pada usahatani jagung di Sulawesi Selatan bernilai positif, dimana kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya campur tangan pemerintah pada usahatani mampu memberikan insentif positif terhadap usahatani jagung sebesar Rp 7.407.530.

Keuntungan secara ekonomi dapat dilihat dari keuntungan sosial usahatani jagung, dimana dalam penelitian ini Sulawesi Selatan memperoleh keuntungan sosial positif yaitu sebesar Rp 7.536.899. Adanya keuntungan sosial yang positif mengindikasikan bahwa usahatani dapat bertahan tanpa adanya intervensi pemerintah. Namun dengan adanya intervensi pemerintah mampu meningkatkan keuntungan usahatani jagung di Sulawesi Selatan, karena dengan adanya kebijakan pemerintah petani dapat membeli input-input *tradable* usahatani lebih murah dari harga seharusnya (harga dunia).

Adanya perbedaan antara keuntungan privat dan sosial menunjukkan adanya divergensi. Identitas penyimpangan atau divergensi merupakan selisih antara harga privat suatu komoditas dengan harga sosialnya. Olagunju (2015) dalam Darmayanti (2018) menyatakan adanya perbedaan atau divergensi keuntungan merupakan transfer bersih (*net transfer*) yang mengukur distorsi yang diakibatkan oleh kebijakan atau kegagalan pasar.

Nilai divergensi dari aspek keuntungan usahatani jagung di Sulawesi Selatan bernilai positif. Nilai divergensi yang bernilai positif menunjukkan bahwa usahatani jagung lebih menguntungkan pada saat terdapat kebijakan pemerintah dibandingkan tanpa adanya kebijakan pemerintah.

5.1.1.1 Analisis Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif dapat dianalisis menggunakan indikator *Private Cost Ratio* (PCR) yang dihitung dari komponen pada tabel PAM.

$$\begin{aligned} \text{PCR Jagung} &= \frac{\text{Biaya Input Non Tradable Privat}}{\text{Pendapatan Privat} - \text{Biaya Input Tradable Privat}} \\ &= \frac{4.856.000}{14.385.530 - 2.122.000} = 0,40 \end{aligned}$$

Keunggulan kompetitif menunjukkan sejauh mana usahatani jagung yang dilakukan mampu membiayai faktor domestiknya pada harga aktual atau harga yang berlaku di pasar. Harga yang berlaku untuk mengukur keunggulan kompetitif jagung merupakan harga yang diterima petani di pasar, dimana harga-harga input yang digunakan tersebut sudah mendapatkan intervensi positif (subsidi) dari pemerintah dan petani memperoleh subsidi bunga kredit. Usahatani jagung dikatakan memiliki keunggulan secara kompetitif jika nilai PCR usahatani yang diperoleh bernilai kurang dari 1.

Berdasarkan hasil perhitungan usahatani jagung di Sulawesi Selatan memiliki keunggulan secara kompetitif dengan nilai $\text{PCR} < 1$ yaitu 0,40. Kondisi ini menunjukkan untuk memperoleh nilai tambah output sebesar Rp 1.000.000 usahatani jagung memerlukan tambahan biaya faktor domestik sebesar Rp 400.000 pada harga aktual. Berdasarkan nilai PCR usahatani jagung di Sulawesi

Selatan telah efisien dalam menggunakan faktor domestiknya atas harga aktual sehingga memiliki keunggulan kompetitif.

5.1.1.2 Analisis Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif dapat dianalisis menggunakan indikator *Domestic Resources Cost Ratio* (DRCR) berdasarkan nilai *Domestic Resources Cost* yang dihitung dari komponen tabel PAM

$$\begin{aligned} \text{DRC Jagung} &= \frac{\text{Biaya Input Non Tradable Sosial}}{\text{Pendapatan Sosial} - \text{Biaya Input Tradable Sosial}} \\ &= \frac{5.719.000}{16.818.899 - 3.563.000} = 0,43 \end{aligned}$$

Suatu komoditas dikatakan memiliki keunggulan secara komparatif jika usahatani yang dilakukan efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik, dan nilai $\text{DRCR} < 1$. DRCR merupakan rasio antara biaya domestik dengan nilai tambah *output* dari biaya input yang diperdagangkan pada harga sosial (bayangan). Keunggulan komparatif menunjukkan sejauh mana sumberdaya domestik dapat dihemat untuk menghasilkan satu satuan devisa.

Berdasarkan hasil perhitungan usahatani jagung di Sulawesi Selatan memiliki keunggulan secara komparatif dengan nilai $\text{DRC} < 1$ sebesar 0,43. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh nilai tambah output sebesar Rp 1.000.000 pada usahatani jagung memerlukan tambahan biaya faktor domestik sebesar Rp 430.000. Berdasarkan nilai DRC usahatani jagung telah efisien dalam menggunakan sumberdaya domestiknya pada harga dunia, sehingga memiliki keunggulan komparatif.

5.1.2 Analisis Daya Saing Usahatani Kedelai

Tabel 7. Keuntungan Privat dan Sosial Usahatani Kedelai di Sulawesi Selatan per Musim per ha (Rp.000), Tahun 2017

Komponen	Biaya			Keuntungan (Rp/ha)
	Penerimaan (Rp/ha)	Input <i>Tradable</i>	Input <i>Non-Tradable</i>	
Privat	10.274.310	1.294.000	4.059.000	4.921.310
Sosial	13.538.000	1.211.000	6.500.360	3.854.950
Divergensi	-3.263.690	83.000	-4.411.360	1.066.360

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2019)

Berdasarkan tabel 7 hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa keuntungan privat/ keuntungan finansial pada usahatani kedelai di Sulawesi Selatan bernilai positif, dimana kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya campur tangan pemerintah pada usahatani mampu memberikan insentif positif terhadap usahatani jagung sebesar Rp 4.921.310 juta/ha.

Keuntungan secara ekonomi dapat dilihat dari keuntungan sosial usahatani kedelai, dimana dalam penelitian ini Sulawesi Selatan memperoleh keuntungan sosial positif yaitu sebesar Rp 3.854.950 juta/ha. Adanya keuntungan sosial yang positif mengindikasikan bahwa usahatani dapat bertahan tanpa adanya intervensi pemerintah.

Nilai divergensi dari aspek keuntungan usahatani kedelai di Sulawesi Selatan bernilai positif. Nilai divergensi yang bernilai positif menunjukkan bahwa usahatani jagung lebih menguntungkan pada saat terdapat kebijakan pemerintah dibandingkan tanpa adanya kebijakan pemerintah.

5.1.2.1 Analisis Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif dapat dianalisis menggunakan indikator *Private Cost Ratio* (PCR) yang dihitung dari komponen pada tabel PAM.

$$\begin{aligned} \text{PCR Kedelai} &= \frac{\text{Biaya Input Non Tradable Privat}}{\text{Pendapatan Privat} - \text{Biaya Input Tradable Privat}} \\ &= \frac{4.059.000}{10.274.310 - 1.294.000} = 0,45 \end{aligned}$$

Keunggulan kompetitif menunjukkan sejauh mana usahatani kedelai yang dilakukan mampu membiayai faktor domestiknya pada harga aktual atau harga yang berlaku di pasar. Harga yang berlaku untuk mengukur keunggulan kompetitif kedelai merupakan harga yang diterima petani di pasar, dimana harga-harga input yang digunakan tersebut sudah mendapatkan intervensi positif (subsidi) dari pemerintah dan petani memperoleh subsidi bunga kredit. Usahatani kedelai dikatakan memiliki keunggulan secara kompetitif jika nilai PCR usahatani yang diperoleh bernilai kurang dari 1.

Berdasarkan hasil perhitungan usahatani kedelai di Sulawesi Selatan memiliki keunggulan secara kompetitif dengan nilai $\text{PCR} < 1$ yaitu 0,45. Kondisi ini menunjukkan untuk memperoleh nilai tambah output sebesar Rp 1.000.000 usahatani jagung memerlukan tambahan biaya faktor domestik Rp 450.000 pada harga aktual. Berdasarkan nilai PCR usahatani jagung di Sulawesi Selatan telah efisien dalam menggunakan faktor domestiknya atas harga aktual sehingga memiliki keunggulan kompetitif.

5.1.2.2 Analisis Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif dapat dianalisis menggunakan indikator *Domestic Resources Cost Ratio* (DRCR) berdasarkan nilai *Domestic Resources Cost* yang dihitung dari komponen tabel PAM

$$\begin{aligned} \text{DRC Kedelai} &= \frac{\text{Biaya Input Non Tradable Sosial}}{\text{Pendapatan Sosial}-\text{Biaya Input Tradable Sosial}} \\ &= \frac{6.500.000}{11.566.310-1.211.000} = 0,62 \end{aligned}$$

Suatu komoditas dikatakan memiliki keunggulan secara komparatif jika usahatani yang dilakukan efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik, dan nilai $\text{DRCR} < 1$. DRCR merupakan rasio antara biaya domestik dengan nilai tambah *output* dari biaya input yang diperdagangkan pada harga sosial (bayangan). Keunggulan komparatif menunjukkan sejauh mana sumberdaya domestik dapat dihemat untuk menghasilkan satu satuan devisa.

Berdasarkan hasil perhitungan usahatani kedelai di Sulawesi Selatan memiliki keunggulan secara komparatif dengan nilai $\text{DRC} < 1$ sebesar 0,62. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh nilai tambah output sebesar Rp 1.000.000 pada usahatani kedelai memerlukan tambahan biaya faktor domestik sebesar Rp 620.000. Berdasarkan nilai DRC usahatani kedelai telah efisien dalam menggunakan sumberdaya domestiknya pada harga dunia, sehingga memiliki keunggulan komparatif

5.2 Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah

Komoditas jagung dan kedelai merupakan komoditas strategis yang ketersediannya senantiasa dikelola oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan internasional serta kebijakan makro ekonomi turut mempengaruhi daya saing komoditas pertanian. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah terhadap komoditas jagung dan kedelai. Kebijakan pemerintah terhadap tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.010/2015 yang menetapkan tarif impor jagung dan kedelai sebesar 5%.

Kebijakan pemerintah terhadap input usahatani yaitu tarif impor, pajak PPN dan subsidi. Tarif impor dan pajak PPN untuk pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.011/2014 menetapkan tarif impor 5% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk impor pupuk mineral atau pupuk kimia yang mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Ecerah Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yaitu pupuk urea Rp 1.800/kg, pupuk SP-36 Rp 2.000/kg, pupuk ZA Rp 1.400/kg dan pupuk NPK Rp 2.300/kg.

Hasil perhitungan pada tabel PAM, kebijakan pemerintah terhadap usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan yaitu:

Tabel 8. Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Jagung dan Kedelai Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator	Satuan	Usahatani Jagung	Usahatani Kedelai
OT	Rp	-2.433.269	-1.292.000
NPCO	%	0,86	0,89
IT	Rp	-1.441.000	83.000
NPCI	%	0,60	1,07
TF	Rp	-863.000	-2.411.360
NT	Rp	34.161	1.066.360
PC	Rp	1,00	0,28
EPC	%	0,93	0,88
SRP	%	0,002	0,92

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2019)

5.2.1 Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Jagung

5.2.1.1 Kebijakan Input

Kebijakan input merupakan kebijakan pemerintah terhadap input produksi pertanian seperti subsidi atau pajak yang dikenakan pada bahan baku usahatani. Berdasarkan tabel 8 kebijakan input pada usahatani jagung dapat dilihat melalui indikator berikut:

a. *Input Transfer* (IT)

Input Transfer (IT) menunjukkan jumlah transfer pada usahatani jagung Provinsi Sulawesi Selatan setelah terdapat kebijakan pemerintah terhadap input *tradable*. Nilai *Input Transfer* usahatani jagung bernilai negatif, artinya terdapat transfer kepada usahatani jagung setelah terdapat kebijakan pemerintah terhadap input *tradable* sebesar Rp 1.441.000. Hal ini

terjadi karena usahatani jagung memiliki biaya aktual yang di bayar usahatani Rp 1.294.000 lebih rendah dari biaya sosial input *tradable* Rp 4.059.000.

Kebijakan pemerintah terhadap input *tradable* pupuk pada usahatani jagung di Sulawesi Selatan berupa tarif impor, pajak PPN dan subsidi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.011/2014 yang menetapkan tarif impor jagung sebesar 5% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk impor pupuk mineral atau pupuk kimia yang mengandung nitrogen, fosfat dan kalium.

Meskipun tarif impor dan pajak PPN membuat harga input *tradable* impor lebih mahal, namun pemerintah menerapkan kebijakan proteksi terhadap konsumen input *tradable* berupa subsidi. Kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122.Permentan/SR.130/11/2013 tentang kebutuhan dan Harga Ecerah Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yaitu pupuk urea Rp 1.800/kg, pupuk SP-36 Rp 2.000/kg, pupuk ZA Rp 1.400/kg dan pupuk NPK Rp 2.300/kg. Sehingga kebijakan pemerintah terhadap input *tradable* mampu memproteksi usahatani. Kondisi ini terjadi karena usahatani membayar lebih rendah input *tradable* dan sebagian biaya pembelian ditanggung oleh pemerintah.

b. *Nominal Protection Coefficient Input (NPCI)*

Nominal Protection Coefficient Input (NPCI) menunjukkan rasio perbedaan harga privat input *tradable* dengan harga sosialnya. Nilai $NPCI < 1$

menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan input *tradable* telah mampu memproteksi usahatani sebagai konsumen input *tradable*.

Nilai NPCI usahatani jagung Sulawesi selatan yaitu 0,60 nilai ini berarti tarif impor dan subsidi yang diberikan atas input *tradable* menyebabkan usahatani hanya membayar 60% dari biaya seharusnya dibayarkan dalam kondisi tidak ada kebijakan.

c. *Transfer Factor* (TF)

Transfer Factor (TF) menunjukkan divergensi atau selisih biaya input *non tradable* pada harga privat dengan harga sosialnya.

Nilai *Transfer Factor* usahatani jagung Sulawesi Selatan bernilai negatif, artinya surplus usahatani komoditi jagung berkurang secara implisit sebesar Rp 863.000. Kondisi ini disebabkan usahatani lebih memilih menggunakan lahannya untuk pertanian jagung daripada komoditi lain yang menjadi alternatif terbaik setelah jagung yaitu kedelai (*opportunity cost of land*). kedelai dipilih sebagai komoditi dengan *opportunity cost of land* karena kedelai merupakan komoditi alternatif selain jagung yang banyak ditanam masyarakat Sulawesi Selatan.

5.2.1.2 Kebijakan Output

Kebijakan output merupakan kebijakan pemerintah terhadap komoditas jagung dan kedelai. Berdasarkan tabel 8 kebijakan output pada usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan dapat dianalisis melalui indikator antara lain:

a. *Output Transfer (OT)*

Output Transfer menunjukkan jumlah transfer yang diterima oleh usahatani maupun oleh konsumen komoditas jagung. Nilai *Output Transfer* pada usahatani jagung negatif Rp 2.433.269. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat transfer kepada konsumen jagung sebesar Rp 2.433.269 akibat perbedaan harga aktual dengan harga yang seharusnya diterima.

Kondisi ini mengakibatkan penerimaan aktual yang diperoleh usahatani lebih kecil dibandingkan pendapatan sosialnya. Dapat diartikan bahwa harga jagung dan kedelai yang diterima secara aktual oleh usahatani lebih rendah dari pada harga sosial yang seharusnya diterima sehingga surplus usahatani jagung dan kedelai menurun dan surplus konsumen jagung meningkat.

Kebijakan yang diterapkan dalam impor jagung dengan tarif sebesar 5% belum mampu membuat harga jagung dalam negeri bersaing. Hal ini terjadi karena harga jagung lebih rendah dibandingkan harga tanpa kebijakan. Sehingga petani menerima harga yang lebih rendah dan penerimaan yang lebih rendah.

b. *Nominal Protection Coefficient output (NPCO)*

Nominal Protection Coefficient output menunjukkan rasio perbedaan harga privat dengan harga sosial. Apabila $NPCO > 1$ maka harga domestik lebih tinggi daripada harga impor dan kebijakan pemerintah telah mampu memproteksi usahatani.

Usahatani jagung memiliki nilai NPCO < 1 yaitu 0,85 artinya kebijakan tarif impor jagung belum mampu memproteksi usahatani jagung di Sulawesi Selatan. Kebijakan tarif impor dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.010/2015 yang menetapkan tarif impor jagung 5% sehingga total output dari usahatani jagung sebesar 0,85 % lebih rendah.

5.2.1.3 Kebijakan Input-Output

Kebijakan input-output melihat dampak buruk gabungan yaitu kebijakan komoditas maupun kebijakan input *tradable*. Berdasarkan tabel 8 dampak kebijakan input-output dapat dilihat melalui indikator berikut:

a. *Net Transfer* (NT)

Net Transfer (NT) menunjukkan jumlah transfer bersih yang merupakan akumulasi dari transfer output dan transfer input. Nilai *Net Transfer* (NT) usahatani jagung di Sulawesi Selatan positif, artinya transfer bersih yang diterima usahatani jagung setelah terdapat kebijakan pemerintah sebesar Rp 34.161.

b. *Profitability Coefficient* (PC)

Profitability Coefficient (PC) merupakan rasio yang mengukur dampak transfer baik transfer output maupun transfer input terhadap keuntungan aktual usahatani. Nilai *Profitability Coefficient* (PC) usahatani jagung di Sulawesi Selatan adalah 1,00 artinya transfer bersih yang mengalir kepada usahatani jagung menyebabkan keuntungan privat 1,00 kali lebih besar dari yang seharusnya apabila tidak terdapat *policy transfer*.

c. *Effectivity Policy Coeficient (EPC)*

Effectivity Policy Coeficient (EPC) menunjukkan efektivitas dampak dari seluruh kebijakan pemerintah. Apabila $EPC > 1$ maka kebijakan pemerintah efektif memproteksi usahatani begitu pula sebaliknya. Nilai EPC usahatani jagung di Sulawesi Selatan < 1 yaitu 0,93 maka kebijakan pemerintah tidak efektif dalam memproteksi usahatani jagung.

d. *Subsidy Ratio for Producer (SRP)*

Subsidy Ratio for Producer (SRP) yaitu rasio subsidi produsen menunjukkan proporsi dari penerimaan total pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi yang digunakan sebagai satu-satunya kebijaksanaan untuk mengganti seluruh kebijaksanaan komoditas dan ekonomi makro. Nilai SRP usahatani jagung di Sulawesi Selatan yaitu 0,002 % artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbalan (*opportunity cost*) untuk berproduksi 0,002%.

5.2.2 Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Kedelai

5.2.2.1 Kebijakan Input

Kebijakan input merupakan kebijakan pemerintah terhadap input produksi pertanian seperti subsidi atau pajak yang dikenakan pada bahan baku usahatani. Berdasarkan tabel 8 kebijakan input pada usahatani kedelai dapat dilihat melalui indikator berikut:

a. *Input Transfer (IT)*

Input Transfer (IT) menunjukkan jumlah transfer pada usahatani kedelai Provinsi Sulawesi Selatan setelah terdapat kebijakan pemerintah terhadap input *tradable*.

Nilai *Input Transfer* usahatani kedelai bernilai positif, artinya terdapat transfer dari usahatani kedelai ke produsen terdapat kebijakan pemerintah terhadap input *tradable* sebesar Rp 83.000. Hal ini terjadi karena usahatani kedelai memiliki biaya aktual yang di bayar usahatani yaitu Rp 1.292.000 lebih tinggi dari biaya sosial input *tradable* yaitu Rp 1.211.000.

Kebijakan pemerintah terhadap input *tradable* pupuk pada usahatani kedelai di Sulawesi Selatan berupa tarif impor, pajak PPN dan subsidi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.011/2014 yang menetapkan tarif impor jagung dan kedelai sebesar 5% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk impor pupuk mineral atau pupuk kimia yang mengandung nitrogen, fosfat dan kalium.

Meskipun tarif impor dan pajak PPN membuat harga input *tradable* impor lebih mahal, namun pemerintah menerapkan kebijakan proteksi terhadap konsumen input *tradable* berupa subsidi. Kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122.Permentan/SR.130/11/2013 tentang kebutuhan dan Harga Ecerah Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014.

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yaitu pupuk urea Rp 1.800/kg, pupuk SP-36 Rp 2.000/kg, pupuk ZA Rp 1.400/kg dan pupuk NPK Rp 2.300/kg. Sehingga kebijakan pemerintah terhadap input *tradable* mampu memproteksi usahatani. Kondisi ini terjadi karena usahatani membayar lebih rendah input *tradable* dan sebagian biaya pembelian ditanggung oleh pemerintah.

b. *Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI)

Nominal Protection Coefficient Input (NPCI) menunjukkan rasio perbedaan harga privat input *tradable* dengan harga sosialnya. Nilai $NPCI < 1$ menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan input *tradable* telah mampu memproteksi usahatani sebagai konsumen input *tradable*.

★ Nilai NPCI usahatani kedelai Sulawesi selatan yaitu 1,07 nilai ini berarti tarif impor dan subsidi yang diberikan atas input *tradable* menyebabkan usahatani hanya membayar tambahan 1.07 % dari biaya seharusnya dibayarkan dalam kondisi tidak ada kebijakan. Artinya kebijakan tidak protektif terhadap usahatani.

c. *Transfer Factor* (TF)

Transfer Factor (TF) menunjukkan divergensi atau selisih biaya input *non tradable* pada harga privat dengan harga sosialnya.

Nilai *Transfer Factor* usahatani kedelai Sulawesi Selatan bernilai negatif, artinya surplus usahatani komoditi jagung berkurang secara implisit sebesar Rp 2.411.360. Kondisi ini disebabkan usahatani lebih memilih menggunakan lahannya untuk pertanian kedelai daripada komoditi lain yang

menjadi alternatif terbaik setelah jagung yaitu jagung (*opportunity cost of land*). Jagung dipilih sebagai komoditi dengan *opportunity cost of land* karena jagung merupakan komoditi alternatif selain kedelai banyak ditanam masyarakat Sulawesi Selatan.

5.2.2.2 Kebijakan Output

Kebijakan output merupakan kebijakan pemerintah terhadap komoditas jagung dan kedelai. Berdasarkan tabel 8 kebijakan output pada usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan dapat dianalisis melalui indikator antara lain:

a. *Output Transfer* (OT)

Output Transfer menunjukkan jumlah transfer yang diterima oleh usahatani maupun oleh konsumen komoditas kedelai. Nilai *Output Transfer* pada usahatani kedelai negatif Rp 1.292.000. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat transfer kepada konsumen jagung sebesar Rp 1.292.000 akibat perbedaan harga aktual dengan harga yang seharusnya diterima.

Kondisi ini mengakibatkan penerimaan aktual yang diperoleh usahatani lebih kecil dibandingkan pendapatan sosialnya. Dapat diartikan bahwa harga jagung dan kedelai yang diterima secara aktual oleh usahatani lebih rendah dari pada harga sosial yang seharusnya diterima sehingga surplus usahatani kedelai menurun dan surplus konsumen jagung meningkat.

Kebijakan yang diterapkan dalam impor kedelai dengan tarif sebesar 5% belum mampu membuat kedelai dalam negeri bersaing. Hal ini terjadi karena harga kedelai lebih rendah dibandingkan harga tanpa kebijakan.

Sehingga petani menerima harga yang lebih rendah dan penerimaan yang lebih rendah.

b. *Nominal Protection Coeficient output* (NPCO)

Nominal Protection Coeficient output menunjukkan rasio perbedaan harga privat dengan harga sosial. Apabila $NPCO > 1$ maka harga domestik lebih tinggi daripada harga impor dan kebijakan pemerintah telah mampu memproteksi usahatani.

Usahatani kedelai memiliki nilai $NPCO < 1$ yaitu 0,89 artinya kebijakan tarif impor jagung belum mampu memproteksi usahatani jagung di Sulawesi Selatan. Kebijakan tarif impor dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.010/2015 yang menetapkan tarifH impor kedelai 5% sehingga total output dari usahatani kedelai sebesar 0,89 % lebih rendah.

5.2.2.3 Kebijakan Input-Output

Kebijakan input-output melihat dampak buruk gabungan yaitu kebijakan komoditas maupun kebijakan input *tradable*. Berdasarkan tabel 8 dampak kebijakan input-output dapat dilihat melalui indikator berikut:

a. *Net Transfer* (NT)

Net Transfer (NT) menunjukkan jumlah transfer bersih yang merupakan akumulasi dari transfer output dan transfer input. Nilai *Net Transfer* (NT) usahatani kedelai di Sulawesi Selatan positif, artinya transfer bersih yang diterima usahatani jagung setelah terdapat kebijakan pemerintah sebesar Rp 1.066.360.

b. *Profitability Coefficient (PC)*

Profitability Coefficient (PC) merupakan rasio yang mengukur dampak transfer baik transfer output maupun transfer input terhadap keuntungan aktual usahatani. Nilai *Profitability Coefficient (PC)* usahatani kedelai di Sulawesi Selatan adalah 1,28 artinya transfer bersih yang mengalir kepada usahatani kedelai menyebabkan keuntungan privat 1,28 kali lebih besar dari yang seharusnya apabila tidak terdapat *policy transfer*.

c. *Effectivity Policy Coefficient (EPC)*

Effectivity Policy Coefficient (EPC) menunjukkan efektivitas dampak dari seluruh kebijakan pemerintah. Apabila $EPC > 1$ maka kebijakan pemerintah efektif memproteksi usahatani begitu pula sebaliknya. Nilai EPC usahatani kedelai di Sulawesi Selatan < 1 yaitu 0,88 maka kebijakan pemerintah tidak efektif dalam memproteksi usahatani kedelai.

d. *Subsidy Ratio for Producer (SRP)*

Subsidy Ratio for Producer (SRP) yaitu rasio subsidi produsen menunjukkan proporsi dari penerimaan total pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi yang digunakan sebagai satu-satunya kebijaksanaan untuk mengganti seluruh kebijaksanaan komoditas dan ekonomi makro. Nilai SRP usahatani kedelai di Sulawesi Selatan yaitu 0,92 % artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbalan (*opportunity cost*) untuk berproduksi 0,92%.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai daya saing, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif terhadap usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keunggulan kompetitif usahatani jagung dan kedelai memiliki nilai $PCR < 1$ yang artinya usahatani mampu membiayai faktor domestiknya pada harga aktual. Nilai PCR jagung 0,40 dan kedelai 0,45. Keunggulan komparatif usahatani jagung dan kedelai memiliki nilai $DRC < 1$ yang artinya usahatani memiliki keunggulan komparatif. Nilai DRC jagung 0,43 dan kedelai 0,62. Berdasarkan nilai DRC jagung dan kedelai telah efisien menggunakan sumberdaya domestiknya pada harga dunia.
2. Kondisi kebijakan pemerintah terhadap usahatani jagung dan kedelai yaitu :
 - a. Kebijakan output yang diterapkan pemerintah dalam impor jagung dan kedelai dengan tarif sebesar 5% belum mampu membuat harga jagung dan kedelai dalam negeri bersaing.
 - b. Kebijakan input yang diterapkan pemerintah seperti subsidi, pajak dan tarif impor mampu memproteksi harga input *tradable* jagung dan belum mampu memproteksi harga input *tradable* kedelai.
 - c. Kebijakan input-output tidak efektif dalam memproteksi usahatani jagung dan kedelai.

6.4 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan analisis daya saing dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang belum mampu memproteksi usahatani dan menerapkan alternatif atau kebijakan tambahan agar mampu memproteksi usahatani jagung dan kedelai sebagai penghasil komoditas bahan baku industri. Pemerintah perlu mengkaji dan menerapkan kebijakan yang protektif terhadap konsumen dan menjaga kestabilan harga jagung dan kedelai dalam negeri.
2. Pemerintah sebagai otoritas penentu otoritas impor komoditas jagung dan kedelai penting untuk memperhatikan perubahan variabel yang memberikan dampak pada kenaikan atau penurunan daya saing usahatani seperti perubahan harga internasional komoditas, perubahan harga internasional pupuk, perubahan harga upah tenaga kerja dan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Pemerintah juga perlu melakukan perubahan kebijakan proteksi terhadap usahatani seperti perubahan tarif impor dan tetap memperhatikan kondisi pasar dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldillah, Rizma. 2017. Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 15 No. 1, Juni 2017: 43-66*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Anggraini, Linanda. 2015. Analisis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Usahatani Kopi Robusta Di Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung.
- Aprizal. 2013. Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Kabupaten Mukomuko. *TesHdais*. Pascasarjana Magister Agribisnis. Universitas Bengkulu.
- Arfah, Siti Yuliaty Chanza. 2016. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Komoditas Kakao Di Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Arma, Makmur Jaya., Uli Fermin dan Laode Sabaruddin. 2013. Pertumbuhan dan Produksi Jagung (*Zea Mays L.*) dan Kacang Tanah (*Arachis Hypogaea L.*) Melalui Pemberian Nutrisi Organik dan Waktu Tanam dalam Sistem Tumpangsari. *Jurnal Agroteknos Maret 2013 Vol. 3 No. 1. Hal 1-7 Issn: 2087-7706*. Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, Kendari 93232.
- Arsyad, Lincolin. 2012. *Ekonomi Manajerial : Ekonomi Mikro Terapan untuk Manajemen Bisnis (Edisi Keempat)*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Aswinda. P. 2017. Analisis Produksi Komoditi Jagung (Studi Kasus: Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Sulawesi dalam Angka 2014. Diakses dari <https://sulsel.bps.go.id>, pada 21 April 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Sulawesi dalam Angka 2015. Diakses dari <https://sulsel.bps.go.id>, pada 21 April 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Sulawesi dalam Angka 2016. Diakses dari <https://sulsel.bps.go.id>, pada 21 April 2019.
- Badan Pusat statistik. 2019. Ekspor dan Impor. Diakses dari https://www.bps.go.id/all_newtemplate.php, 21 Mei 2019.
- Badan Pusat statistik. 2019. Realisasi Penerimaan Negara Milyar Rupiah 2007-2019. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable>, pada 21 Mei 2019

- Bank Indonesia. 2019. Informasi Kurs. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>, Pada 21 Mei 2019.
- Darmayanti, Ni Wayan Surya. 2018. Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan pemerintah Terhadap Komoditas Jagung di Wilayah Sentra Produksi di Indonesia (Analisi Daya Saing dengan Pendekatan (*Policy Analysis Matrix*)). *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Dermoredjo, Saktyanu K. 2018. Pemetaan Daya Saing Pertanian Di Indonesia.. Diakses <https://pse.litbang.pertanian.go.id>, pada 15 Maret 2019.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2015. Kebijakan strategis pangan dan gizi 2015-2019 diakses dari <http://bkp.pertanian.go.id>, pada 13 Maret 2019.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Andi:Yogyakarta.
- Hutabarat, Budiman F., Adi Setiyanto., Rudy S. Rifai dan Henny Mayrowani. 2014. Kajian Kebijakan Stabilitas Harga Bersa/Gabah, Jagung dan Kedelai. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. *Online*. Departemen Pertanian diakses dari <https://pse.litbang.pertanian.go.id>, pada 10 April 2019.
- Irana, Novia Nanda Dwi. 2018. Hubungan Antara Unsur-Unsur Iklim Dengan Produktivitas Tanaman Jagung (*Zea Mays L.*) Di Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
- Kementerian Pertanian, 2016. Outlook Kedelai Diakses dari <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id>, pada 11 Maret 2019
- Kementerian Pertanian. 2017. Sistem Informasi Harga. Diakses dari <http://aplikasi2.pertanian.go.id/simharga2017>, pada 21 Mei 2019
- Karlinda, Fitri. 2015. Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Ekspor Mutiara Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2017. Diakses dari <http://ppid.pertanian.go.id>, pada 11 Maret 2019.
- Nurayati, Aisyah. 2015. Analisis Daya Saing dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi, Jagung Dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Pratama, Willy. 2015. Analisis Daya Saing Kedelai Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

- Priokport. 2018. Tarif Drybulk. Diakses dari <http://www.priokport.co.id/index.php/tariff/drybulk> pada 21 Mei 2019.
- Purnoto, Sugi. 2016. Supply Chain indonesia. Diakses dari http://supplychainindonesia.com/new/wpcontent/files/Standar_Perhitungan_Tarif_Angkutan_Barang_Distribusi_dan_Logistik_di_Indonesia_Sugi_Purnoto_S.E._M.M.pdf, pada 21 Mei 2019.
- Purwandari, Sintha Eliesty, Astri Anto dan Suriansyah. 2014. Teknologi Budidaya Jagung dengan Pendekatan PTT. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah. Diakses <https://kalteng.litbang.pertanian.go.id>, pada 14 Maret 2019.
- Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 diakses dari <https://www.bappenas.go.id>, pada 2 juni 2017.
- Sarwono, Willy Pratama. (2014). Analisis Daya Saing Kedelai Indonesia, *JEJAK Journal of Economics and Policy* 7 (2): 100-202 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596.
- Siregar, Masdjidin dan Sumaryanto. 2003. Analisis Daya Saing Usahatani Kedelai di Das Brantas. *Jurnal Agro Ekonomi Volume 21 No. 1 Mei 2003 : 50 – 71*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Suhartini, Sri Hastuti. 2018. Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Kedelai. *Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16 No. 2, Desember 2018: 89-109*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Indonesia.
- Soesanto, Loekas. 2015. *Kompodium Penyakit-Penyakit Tanaman Kedelai*. PT Bumi Aksa : Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Wibowo, Imam Mukti. 2013. Analisis Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Usahatani Padi Semiorganik Di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian.Bogor.
- Wirosoedarmo, Ruslan., A. Tunggul. Sutanhaji., Evi Kurniati dan Rizky Wijayanti. 2011. Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung Menggunakan Metode Analisis Spasial. *Jurnal Agritech 31(1): 71-78*. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijawa Malang.
- World Bank. 2019. Commodities Price Data (The Pink Sheet). Diakses dari <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf>, pada 21 Mei 2019.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Indikator Penelitian

Rumusan Masalah	Indikator	Informasi yang di Perlukan untuk Menjawab Rumusan Masalah
1. Bagaimana keunggulan komparatif dan keunggulan komparatif usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan	a. Keunggulan komparatif	a. Biaya sosial input non <i>tradable</i> b. Biaya sosial input <i>tradable</i> c. Penerimaan sosial usahatani
	b. Keunggulan kompetitif	a. Biaya privat input non <i>tradable</i> b. Biaya privat input <i>tradable</i> c. Penerimaan sosial usahatani
2. Bagaimana daya saing usahatani jagung dan kedelai di Sulawesi Selatan	a. Kebijakan Input	a. Biaya input <i>tradable</i> usahatani atas harga privat dan sosial b. Biaya input <i>non tradable</i> usahatani atas harga privat dan sosial
	b. Kebijakan Output	a. Penerimaan usahatani atas harga privat dan sosial
	b. Kebijakan input-output	a. Keuntungan usahatani atas dasar harga privat dan sosial b. Penerimaan usahatani atas dasar harga privat dan sosial c. Biaya input <i>tradable</i> usahatani atas harga privat dan sosial d. Efek divergensi keuntungan usahatan

Lampiran 2 Peta Lokasi Penelitian



Lampiran 3 Data Harga komoditas Bank Dunia

<http://www.worldbank.org/commodities>

World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)

4-Feb-2019

Commodity	Unit	Annual Averages			Quarterly Averages				Monthly Averages				
		Jan-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec	Oct-Dec	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dec	Nov	Dec	Jan	
		2016	2017	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	
Energy													
Coal, Australia	\$/mt	a/	66.1	88.5	107.0	98.2	103.0	104.4	117.0	103.6	100.7	101.4	98.6
Coal, South Africa	\$/mt		63.9	85.1	97.6	92.8	93.2	99.4	102.2	95.8	91.6	95.4	91.3
Crude oil, average	\$/bbl		42.8	52.8	68.3	58.7	64.6	71.4	73.0	64.3	62.3	54.0	56.6
Crude oil, Brent	\$/bbl	a/	44.0	54.4	71.1	61.5	67.0	74.5	75.5	67.4	65.2	56.5	59.3
Crude oil, Dubai	\$/bbl	a/	41.2	53.1	69.2	59.2	64.0	71.8	74.0	66.8	65.1	56.5	59.0
Crude oil, WTI	\$/bbl	a/	43.2	50.9	64.8	55.4	62.9	67.9	69.7	58.8	56.7	49.0	51.5
Natural gas, Index	2010=100		57.0	68.9	82.1	72.3	75.8	75.9	82.7	93.7	97.4	94.1	80.0
Natural gas, Europe	\$/mmbtu	a/	4.6	5.7	7.7	6.7	6.7	7.3	8.4	8.3	8.3	8.0	7.3
Natural gas, US	\$/mmbtu	a/	2.5	3.0	3.2	2.9	3.1	2.8	2.9	3.8	4.1	4.0	3.1
Natural gas, LNG Japan	\$/mmbtu	a/	7.4	8.6	10.7	8.5	9.8	10.3	10.9	11.8	11.7	12.0	12.0
Non Energy Commodities													
Agriculture													
Beverages													
Cocoa	\$/kg	b/	2.89	2.03	2.29	2.05	2.19	2.57	2.24	2.18	2.19	2.21	2.26
Coffee, Arabica	\$/kg	b/	3.61	3.32	2.93	3.08	3.01	2.97	2.77	2.95	3.02	2.80	2.83
Coffee, Robusta	\$/kg	b/	1.95	2.23	1.87	2.04	1.96	1.93	1.78	1.81	1.84	1.71	1.72
Tea, average	\$/kg		2.68	3.15	2.85	3.22	2.98	2.95	2.78	2.69	2.70	2.62	2.55
Tea, Colombo auctions	\$/kg	b/	3.30	4.05	3.61	4.14	4.07	3.68	3.33	3.34	3.36	3.18	3.23
Tea, Kolkata auctions	\$/kg	b/	2.33	2.42	2.36	2.58	1.95	2.55	2.57	2.37	2.39	2.39	2.12
Tea, Mombasa auctions	\$/kg	b/	2.42	2.97	2.58	2.94	2.92	2.61	2.43	2.36	2.36	2.30	2.29
Food													
Oils and Meals													
Coconut oil	\$/mt	b/	1,482	1,651	1,001	1,497	1,252	1,030	913	807	787	796	773
Fishmeal	\$/mt		1,491	1,367	1,525	1,414	1,602	1,529	1,488	1,482	1,479	1,480	1,486
Groundnuts	\$/mt		1,393	1,487	1,320	1,272	1,189	1,444	1,412	1,234	1,224	1,213	1,235
Groundnut oil	\$/mt	b/	1,381	1,461	1,446	1,498	1,434	1,450	1,465	1,435	1,438	1,435	1,380
Palm oil	\$/mt	b/	736	751	639	718	706	682	612	555	539	535	585
Palmkernel oil	\$/mt		1,301	1,268	927	1,390	1,142	936	881	747	708	738	765
Soybean meal	\$/mt	b/	375	350	405	355	414	447	391	369	366	361	362
Soybean oil	\$/mt	b/	815	850	789	878	850	805	765	736	729	728	748
Soybeans	\$/mt	b/	405	393	394	393	412	421	370	374	374	381	382
Grains													
Barley	\$/mt	b/	103.9	97.6	125.9	108.2	127.2	130.9	126.0	119.4	119.4	119.4	119.4
Maize	\$/mt	b/	159.2	154.5	164.4	148.8	163.7	173.3	157.9	162.8	160.7	167.4	166.7
Rice, Thailand 5%	\$/mt	b/	396.2	398.9	420.7	400.7	432.3	443.0	402.7	404.7	401.0	404.0	410.0
Rice, Thailand 25%	\$/mt		385.3	384.7	408.1	385.3	417.0	429.0	392.0	394.3	391.0	395.0	402.0
Rice, Thailand A1	\$/mt		380.3	379.9	401.1	381.0	407.4	423.5	390.5	382.8	378.8	379.3	387.4
Rice, Vietnam 5%	\$/mt		356.1	363.2	406.1	379.5	395.4	425.2	409.0	395.0	395.7	399.5	396.3
Sorghum	\$/mt		155.6	163.0	168.6	171.3	182.4	173.0	158.9	160.1	157.5	163.8	162.9
Wheat, US HRW	\$/mt	b/	166.6	174.2	209.9	179.8	192.2	215.7	222.4	209.4	203.6	211.3	209.8
Wheat, US SRW	\$/mt		176.3	178.2	203.9	175.1	189.3	204.9	208.8	212.6	210.8	217.8	220.2
Other Food													
Bananas, EU	\$/kg		0.91	0.90	..	0.92
Bananas, US	\$/kg	b/	1.00	1.08	..	1.09
Meat, beef	\$/kg	b/	4.06	4.39	4.20	4.29	4.36	4.31	4.10	4.00	3.95	4.19	4.24
Meat, chicken	\$/kg	b/	1.85	2.12	2.24	1.97	2.09	2.58	2.26	2.05	2.03	2.09	2.15
Meat, sheep	\$/kg		4.69	5.42	5.97	5.71	5.87
Oranges	\$/kg	b/	0.89	0.81	0.79	0.82	0.76	0.83	0.84	0.73	0.73	0.72	0.64
Shrimp	\$/kg		11.22	13.32	12.24	12.12	12.63	12.76	11.93	11.64	11.66	11.79	11.79
Sugar, EU	\$/kg	b/	0.36	0.37	0.39	0.38	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37
Sugar, US	\$/kg	b/	0.61	0.62	0.56	0.60	0.57	0.55	0.56	0.55	0.55	0.56	0.56
Sugar, World	\$/kg	b/	0.40	0.35	0.28	0.32	0.29	0.27	0.25	0.29	0.28	0.28	0.28

continued on next page

World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)

4-Feb-2019

Commodity	Unit	Annual Averages			Quarterly Averages				Monthly Averages			
		Jan-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec	Oct-Dec	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dec	Nov	Dec	Jan
		2016	2017	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019
Raw Materials												
Timber												
Logs, Cameroon	\$/cum	387.4	395.2	413.5	412.3	430.3	417.5	407.0	399.4	397.7	398.5	399.7
Logs, Malaysia	\$/cum b/	274.4	265.4	269.7	263.7	274.9	272.9	267.0	264.0	262.7	265.4	273.2
Plywood	\$/sheets	503.3	486.9	494.7	483.7	504.3	500.5	489.7	484.2	481.9	486.9	501.2
Sawnwood, Cameroon	\$/cum	649.6	617.3	640.0	636.1	666.9	652.3	624.5	616.3	617.9	607.5	617.2
Sawnwood, Malaysia	\$/cum b/	738.9	702.1	727.9	723.5	758.5	742.0	710.3	701.0	702.8	691.0	702.1
Woodpulp	\$/mt	875.0	875.0	875.0	875.0	875.0	875.0	875.0	875.0	875.0	875.0	875.0
Other Raw Materials												
Cotton	\$/kg b/	1.64	1.84	2.01	1.80	1.99	2.09	2.07	1.91	1.91	1.90	1.82
Rubber, RSS3	\$/kg b/	1.61	2.00	1.57	1.62	1.73	1.66	1.46	1.40	1.35	1.44	1.59
Rubber, TSR20	\$/kg	1.38	1.67	1.37	1.45	1.47	1.40	1.33	1.27	1.23	1.26	1.36
Fertilizers												
DAP	\$/mt b/	315.8	323.0	393.4	341.2	369.5	386.9	410.5	406.9	410.2	389.7	382.1
Phosphate rock	\$/mt b/	110.5	89.7	87.9	80.0	82.4	87.6	87.3	94.3	92.5	99.2	102.5
Potassium chloride	\$/mt b/	280.3	218.2	215.5	215.5	215.5	215.5	215.5	215.5	215.5	215.5	215.5
TSP	\$/mt b/	291.1	283.3	346.7	296.0	321.3	328.7	359.3	377.3	379.0	368.0	355.0
Urea, E. Europe	\$/mt b/	194.1	213.9	249.4	249.0	228.2	225.5	260.0	284.1	305.6	276.7	260.0
Metals and Minerals												
Aluminum	\$/mt b/	1,604	1,968	2,108	2,103	2,154	2,264	2,053	1,963	1,939	1,920	1,854
Copper	\$/mt b/	4,868	6,170	6,530	6,823	6,957	6,881	6,118	6,164	6,196	6,075	5,939
Iron ore	\$/dmt b/	58.4	71.8	69.8	66.1	74.7	65.6	66.7	71.9	73.3	69.2	76.2
Lead	\$/mt b/	1,867	2,315	2,240	2,490	2,518	2,383	2,094	1,966	1,937	1,972	1,997
Nickel	\$/mt b/	9,595	10,410	13,114	11,601	13,284	14,470	13,239	11,463	11,240	10,835	11,523
Tin	\$/mt b/	17,934	20,061	20,145	19,803	21,187	20,937	19,309	19,149	19,065	19,260	20,458
Zinc	\$/mt b/	2,060	2,891	2,922	3,230	3,415	3,112	2,534	2,629	2,596	2,616	2,570
Precious Metals												
Gold	\$/toz c/	1,249	1,258	1,269	1,275	1,329	1,307	1,213	1,229	1,221	1,250	1,292
Platinum	\$/toz c/	987	948	890	921	977	905	814	822	846	791	807
Silver	\$/toz c/	17.1	17.1	15.7	16.7	16.7	16.6	15.0	14.6	14.4	14.8	15.6
World Bank commodity price indices for low and middle income countries (2010=100)												
Energy		55.1	68.1	87.0	75.2	82.2	89.5	92.6	83.8	81.9	72.6	73.8
Non Energy Commodities		79.4	83.8	85.2	84.5	87.7	89.1	82.7	81.4	81.1	80.8	81.3
Agriculture		87.5	87.0	86.7	85.3	88.6	90.8	84.6	82.8	82.2	82.7	83.6
Beverages		91.3	83.1	79.1	80.7	79.9	83.6	76.2	76.6	77.6	74.8	75.3
Food		89.6	90.2	90.5	88.7	92.5	95.4	88.1	85.8	84.8	86.1	87.0
Oils and Meals		88.3	87.6	85.0	86.8	90.2	91.0	81.3	77.6	76.7	76.6	78.5
Grains		80.7	80.5	88.8	80.3	87.4	92.8	87.6	87.2	85.9	88.4	88.4
Other Food		99.5	102.4	99.1	98.7	100.2	103.6	97.4	95.3	94.6	96.4	96.8
Raw Materials		80.2	81.2	81.4	79.3	83.4	83.3	80.4	78.6	78.3	78.3	79.7
Timber		89.6	85.6	88.3	87.4	91.5	89.8	86.4	85.3	85.4	84.5	86.2
Other Raw Materials		70.0	76.3	73.9	70.5	74.6	76.2	73.8	71.2	70.5	71.5	72.7
Fertilizers		77.8	74.3	82.5	78.3	77.1	78.0	84.6	90.2	93.1	89.4	86.8
Metals and Minerals		63.0	78.2	82.5	83.7	87.2	86.7	78.4	77.6	77.5	76.1	75.8
Base Metals	d/	68.3	84.9	90.6	92.6	95.6	96.4	86.0	84.2	83.8	82.7	81.3
Precious Metals		97.5	97.8	97.2	98.6	102.1	100.4	92.8	93.4	92.7	94.9	98.4

Notes and Abbreviations:

a/ Included in the energy index, b/ Included in the non-energy index, c/ Included in the precious metals index, d/ Metals and Minerals excluding iron ore.

\$ = US dollar bbl = barrel cum = cubic meter dmt = dry metric ton kg = kilogram mmbtu = million British thermal units mt = metric ton toz = troy oz
.. = not available

continued on next page

Lampiran 4 Tabel Alokasi Biaya Input Domestik dan Asing pada Usahatani Jagung dan Kedelai

Komponen	Asing (%)	Domestik (%)
Benih ¹⁾	97	3
Pupuk Urea ¹⁾	2	98
Pupuk SP36 ²⁾	64	36
Pupuk KCL ²⁾	64	36
Pupuk NPK ²⁾	64	36
Pupuk ZA ²⁾	64	36
Obat-Obatan	62	38
Lahan	0	100
Peralatan Saprodi	100	0
Tenaga Kerja	0	100

Sumber : 1) Tabel Output 2010, 2) Aldilah 2016 dalam Darmayanti (2018)

Lampiran 5 Tabel Perhitungan *Standar Conversion Factor* dan *Shadow Price Exchange Rate* 2017

Uraian	Nilai
Total nilai ekspor (Xt) milyar rupiah ¹⁾	180.012.674.001.96
Total nilai impor (Mt) milyar rupiah ¹⁾	188.711.350.191.39
Penerimaan pajak ekspor (TXt) milyar rupiah ²⁾	4.422.50
Penerimaan pajak impor (TMt) milyar rupiah ²⁾	38.899.30
Nilai tukar resmi (OER) (Rp/US \$) ³⁾	14.163
Xt + Mt	368.724.024.193
Xt – TXt	180.012.669.579
MT + TMt	188.711.389.091
Faktor konversi standar (SCF)	1.00
Nilai tukar bayangan (SER) (Rp/US \$)	14.163

Sumber :

- 1) https://www.bps.go.id/all_newtemplate.php (Akses 21 Mei 2019)
- 2) <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipenerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html> (Akses 21 Mei 2019)
- 3) <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx> (Akses 21 Mei 2019)

Lampiran 6 Tabel Perhitungan Harga Bayangan Benih Jagung dan Kedelai Sulawesi Selatan

Tabel Perhitungan Harga Bayangan (Benih Jagung)

Uraian	Satuan	Harga
Harga aktual benih	Rp/kg	65.000
Harga aktual jagung pipilan	Rp/kg	4.598
Harga bayangan jagung pipilan	Rp/kg	2.373
Harga Bayangan Benih	Rp/kg	33.546

Sumber : <http://aplikasi2.pertanian.go.id/simharga2017/> (21 Mei 2019)

Tabel Perhitungan Harga Bayangan (Benih Kedelai)

Uraian	Satuan	Harga
Harga aktual benih	Rp/kg	25.000
Harga aktual kedelai	Rp/kg	12.598
Harga bayangan kedelai	Rp/kg	4.122
Harga Bayangan Benih	Rp/kg	8.130

Sumber : <http://aplikasi2.pertanian.go.id/simharga2017/> (21 Mei 2019)

Lampiran 7 Perhitungan Harga Bayangan Output Jagung dan Kedelai

Tabel Perhitungan Harga Bayangan Output (Jagung Pipilan)

Uraian	Satuan	Harga
CIF Indonesia ¹⁾	\$/kg	0.214
Nilai tukar ²⁾	Rp/kg	14.163
CIF Indonesia dalam mata uang domestik	Rp/kg	3.031
a. Pelabuhan - Pasar induk	Rp/kg	430.09
b. Pasar induk - Pedagang Provinsi	Rp/kg	431.61
c. Biaya bongkar muat	Rp/kg	66
d. Peti kemas antar pulau	Rp/kg	819
Harga sosial di petani	Rp/kg	4.777

Sumber :

- 1) <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf> (Akses 21 Mei 2019)
- 2) <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipenerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html> (Akses 21 Mei 2019)
- 3) http://supplychainindonesia.com/new/wpcontent/files/Standar_Perhitungan_Tarif_Angkutan_Barang_Distribusi_dan_Logistik_di_Indonesia_Sugi_Purno_to_S.E._M.M.pdf (Akses 21 Mei 2019)
- 4) <http://www.priokport.co.id/index.php/tariff/drybulk> (Akses 21 Mei 2019)

Tabel Perhitungan Harga Bayangan Output (Kedelai)

Uraian	Satuan	Harga
CIF Indonesia ¹⁾	\$/kg	0.166
Nilai tukar ²⁾	Rp/kg	14.163
CIF Indonesia dalam mata uang domestik	Rp/kg	2.351
a. Pelabuhan - Pasar induk	Rp/kg	430.09
b. Pasar induk - Pedagang Provinsi	Rp/kg	431.61
c. Biaya bongkar muat	Rp/kg	66
d. Peti kemas antar pulau	Rp/kg	819
Harga sosial di petani	Rp/kg	4.097

Sumber :

- 1) <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf> (Akses 21 Mei 2019)
- 2) <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipenerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html> (Akses 21 Mei 2019)
- 3) http://supplychainindonesia.com/new/wpcontent/files/Standar_Perhitungan_Tarif_Angkutan_Barang_Distribusi_dan_Logistik_di_Indonesia_Sugi_Purno_to_S.E._M.M.pdf (Akses 21 Mei 2019)
- 4) <http://www.priokport.co.id/index.php/tariff/drybulk> (Akses 21 Mei 2019)

Lampiran 8 Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk Urea

Uraian	Satuan	Harga
FOB Indonesia ¹⁾	\$/kg	0.20
Nilai tukar ²⁾	Rp/kg	14.163
FOB Indonesia dalam mata uang domestik	Rp/kg	2.832
a. Pelabuhan - Pasar induk	Rp/kg	430.09
b. Pasar induk - Pedagang Provinsi	Rp/kg	431.61
c. Biaya bongkar muat	Rp/kg	66
Peti kemas		819
Harga sosial di petani	Rp/kg	3.279

Sumber :

- 1) <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf> (Akses 21 Mei 2019)
- 2) <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipenerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html> (Akses 21 Mei 2019)
- 3) http://supplychainindonesia.com/new/wpcontent/files/Standar_Perhitungan_Tarif_Angkutan_Barang_Distribusi_dan_Logistik_di_Indonesia_Sugi_Purno_to_S.E._M.M.pdf (Akses 21 Mei 2019)
- 4) <http://www.priokport.co.id/index.php/tariff/drybulk> (Akses 21 Mei 2019)

Lampiran 9 Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk SP36

Uraian	Satuan	Harga
CIF Indonesia ¹⁾	\$/kg	0.296
Nilai tukar ²⁾	Rp/kg	14.163
CIF Indonesia dalam mata uang domestik	Rp/kg	3.809
a. Pelabuhan - Pasar induk	Rp/kg	430.09
b. Pasar induk - Pedagang Provinsi	Rp/kg	431.61
c. Biaya bongkar muat	Rp/kg	66
Angkut peti kemas		819
Hargasosial di petani	Rp/kg	5.556

Sumber :

- 1) <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf> (Akses 21 Mei 2019)
- 2) <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipenerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html> (Akses 21 Mei 2019)
- 3) http://supplychainindonesia.com/new/wpcontent/files/Standar_Perhitungan_Tarif_Angkutan_Barang_Distribusi_dan_Logistik_di_Indonesia_Sugi_Purno_to_S.E._M.M.pdf (Akses 21 Mei 2019)
- 4) <http://www.priokport.co.id/index.php/tariff/drybulk> (Akses 21 Mei 2019)

Lampiran 10 Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk KCL

Uraian	Satuan	Harga
CIF Indonesia ¹⁾	\$/kg	0.370
Nilai tukar ²⁾	Rp/kg	14.163
CIF Indonesia dalam mata uang domestik	Rp/kg	5240
a. Pelabuhan - Pasar induk	Rp/kg	430.09
b. Pasar induk - Pedagang Provinsi	Rp/kg	431.61
c. Biaya bongkar muat	Rp/kg	66
Angkut peti kemas		819
Harga sosial di petani	Rp/kg	6.168

Sumber :

- 1) <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf> (Akses 21 Mei 2019)
- 2) <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipenerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html> (Akses 21 Mei 2019)
- 3) http://supplychainindonesia.com/new/wpcontent/files/Standar_Perhitungan_Tarif_Angkutan_Barang_Distribusi_dan_Logistik_di_Indonesia_Sugi_Purno_to_S.E._M.M.pdf (Akses 21 Mei 2019)
- 4) <http://www.priokport.co.id/index.php/tariff/drybulk> (Akses 21 Mei 2019)

Lampiran 11 Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk ZA

Uraian	Satuan	Harga
CIF Indonesia ¹⁾	\$/kg	0.156
Nilai tukar ²⁾	Rp/kg	14.163
CIF Indonesia dalam mata uang domestik	Rp/kg	2.209
a. Pelabuhan - Pasar induk	Rp/kg	430.09
b. Pasar induk - Pedagang Provinsi	Rp/kg	431.61
c. Biaya bongkar muat	Rp/kg	66
Angkut peti kemas		819
Harga sosial di petani	Rp/kg	3.137

Sumber :

- 1) <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf> (Akses 21 Mei 2019)
- 2) <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipenerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html> (Akses 21 Mei 2019)
- 3) http://supplychainindonesia.com/new/wpcontent/files/Standar_Perhitungan_Tarif_Angkutan_Barang_Distribusi_dan_Logistik_di_Indonesia_Sugi_Purno_to_S.E._M.M.pdf (Akses 21 Mei 2019)
- 4) <http://www.priokport.co.id/index.php/tariff/drybulk> (Akses 21 Mei 2019)

Lampiran 12 Tabel Perhitungan Harga Bayangan Pupuk NPK

Uraian	Satuan	Harga
HET pupuk NPK	Rp/kg	2300
Rasio pupuk subsidi dan non subsidi 3-5 kali HET	Rp/kg	3
Harga bayangan	Rp/kg	6900
Biaya distribusi	Rp/kg	433.62
Harga bayangan ditingkat petani	Rp/kg	6466.38

Sumber :Perhitungan pupuk NPK, mengikuti perhitungan Nursan (2015) dalam Darmayanti (2018).

Lampiran 13 Tabel Analisis Budget Privat dan Sosial Usahatani Jagung

Uraian	Satuan	Jumlah	Analisis Finansial			Analisis Ekonomi				
			Harga (Rp/Satuan)	Nilai (000)	Asing (000)	Domestik (000)	Harga (Rp/Satuan)	Nilai (000)	Asing (000)	Domestik (000)
Benih	kg/ha	14	65.000	899	872	27	33.546	470	456	14
Pupuk	kg/ha	600	2.280	1.370	877	493	4.921	2.952	1.889	
Pestisida	kg/ha	1	352.020	352	218	134	352.020	352	1.063	
TKLK	HOK/ha	33	50.568	1.663		1.663	47.731	1.575		1.575
TKDL	HOK/ha	49	50.568	2.497		2.497	47.731	2.338		2.338
Sewa lahan	ha	1	1.792.000	1.792			1.792.000	1.792		1.792
Penyusutan		1	155.420	155	155		155.420	155	155	
Total Biaya				8.729				9.634		
Total Bunga				44		44		1.48		1.48
Total biaya + Total bunga	Rp			8.772	2.122	4.856		9.634	3.563	5.719
Penerimaan				14.385				16.818		
R/C				1.64				1.71		

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2019)

Lampiran 14 Tabel Analisis Budget Privat dan Sosial Usahatani Kedelai

Uraian	Satuan	Jumlah	Analisis Finansial			Analisis Ekonomi				
			Harga (Rp/Satuan)	Nilai (000)	Asing (000)	Domestik (000)	Harga (Rp/Satuan)	Nilai (000)	Asing (000)	Domestik (000)
Benih	kg/ha	24	25.000	591	573	18	8.130	195	189	6
Pupuk	kg/ha	197	2.280	449	287	162	4.921	969	620	349
Pestisida	kg/ha	1	363.570	364	255	138	363.570	364	226	1.384
TKLK	HOK/ha	29	50.568	1.456		1.456	47.731	1.384		2.148
TKDL	HOK/ha	45	50.568	2.274		2.274	47.731	2.148		2.613
Sewa lahan	ha	1	2.613.330	2.613			2.613.330	2.613		
Penyusutan		1	179.170	179	179		179.170	176	176	
Total Biaya				7.927				7.849		
Total Bunga				11		11		0.36		0.36
Total biaya + Total bunga	Rp			7.938	1.294	4.059		7.849	1.211	6.500.36
Penerimaan				10.274				11.566		
R/C				0.29				1.47		

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2019)

Lampiran 15 Surat Izin Penelitian



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Makassar, 29 Mei 2019

Nomor : B-211/BPS/7300/199/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **Bukti Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
Ketua LP3M UNISMUH Makassar
di-

Makassar

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sulawesi Selatan Nomor : 16597/S.01/PTSP/2019 Tanggal 23 Mei 2019 perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa peneliti yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : HARDIANTI SYAM
Nomor Pokok : 10596 01918 15
Program Studi : Agribisnis
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penelitian dengan judul : **“ANALISIS DAYA SAING USAHA TANI JAGUNG DAN KEDELAI DI SULAWESI SELATAN ”**

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Integrasi, Pengolahan dan
Diseminasi Statistik



Muktamar Amal, S.Si, M.Si
NIP: 19670730199003 1 001

Lampiran 16 Dokumentasi Penelitian



Gambar 5 : Peneliti Bersama Staf Perpustakaan BPS Sulawesi Selatan

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bulukumba tanggal 19 Juni 1997 dari ayah Saming dan ibu Nurmi. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Mulai mengikuti pendidikan formal pada tahun 2003 di SDN 229 Gantarang dan lulus pada tahun 2009. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tompobulu dan lulus pada tahun 2012. Tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMKS Al-Furqan dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima di Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis program Strata Satu (S1).

Pengalaman Organisasi tahun 2015 bergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Fakultas Pertanian (IMM FAPERTA) dan tahun 2016 diamanahkan sebagai Departemen Bidang Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2015/2016. Selain itu penulis juga aktif sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Agribisnis periode 2017/2018.

Karya ilmiah yang pernah ditulis yaitu “APELKU SIANIDA (*Cassave Peel*, Kripik Kulit Singkong Rasa Manis Pedas)” pada Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2016. Tugas akhir dalam pendidikan di perguruan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul ”Analisis Daya Saing Usahatani Jagung dan Kedelai di Sulawesi Selatan”.

